

**PRODUKSI RUANG ADAT *ULAYAT*:  
STUDI KASUS SENGKETA PEREBUTAN TANAH *ULAYAT* DI BLOK  
MAYASIH KECAMATAN CIGUGUR**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Dengan Peminatan Metode Ilmu Politik**

**Oleh:**

**REYNALDI ISTANTO**

**NIM. 145120507111032**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2018**

## **TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : **Produksi Ruang Adat *Ulayat* : Studi Kasus Sengketa Perebutan Tanah *Ulayat* di Blok Mayasih Kecamatan Cigugur**

Disusun Oleh : Reynaldi Istanto

NIM : 145120507111032

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Politik

Konsentrasi : Metode Ilmu Politik

Malang, 05 Maret 2018

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis Penguji

Dr. Sholih Mu'adi, S.H., M.Si  
NIP. 196412301993031002

Ibnu Asqori Pohan, S.Sos., M.A.  
NIP. 2016078311181001

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**  
**PRODUKSI RUANG ADAT *ULAYAT*:**  
**STUDI KASUS SENGKETA PEREBUTAN TANAH *ULAYAT* DI BLOK**  
**MAYASIH KECAMATAN CIGUGUR**  
**SKRIPSI**

Disusun Oleh :  
Reynaldi Istanto  
NIM. 145120507111032

Telah diuji dan dinyatakan **lulus** dalam ujian Sarjana Ilmu Politik

Pada tanggal 26 Februari 2018

Tim Penguji :

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis Penguji

Dr. Sholih Mu'adi, S.H., M.Si  
NIP. 196412301993031002

Ibnu Asqori Pohan, S.Sos., M.A.  
NIP. 2016078311181001

Anggota Majelis Penguji I

Anggota Majelis Penguji II

Tri Hendra Wahyudi, S.IP., M.IP.  
NIP. 2013098007071001

Ahmad Hasan Ubaid, S.IP., M.IP.  
NIP. 2016078204211001

Malang, 05 Maret 2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Unti Ludigdo, SE., M.Si., Ak  
NIP. 196908141994021001

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70.

Malang, 05 Maret 2018

Mahasiswa

Reynaldi Istano  
NIM. 145120507111032

## Abstrak

**Reynaldi Istanto, 2018, Produksi Ruang Adat *Ulayat*: Studi Kasus Sengketa Perebutan Tanah *Ulayat* di Blok Mayasih Kecamatan Cigugur. Tim Pembimbing : Dr. Sholih Mu'adi , SH, M.Si dan Ibnu Asqori Pohan, S.Sos, M.A.**

---

Sebagai kelompok masyarakat adat AKUR Cigugur memiliki tanah *ulayat* yang ditujukan untuk kepentingan komunal yang tidak dapat dimiliki dan dibagi wariskan. Saat ini salah satu tanah *ulayat* masyarakat AKUR Cigugur sedang mengalami sengketa dengan salah satu keturunan tokoh adat yaitu Djaka Rumantaka yang melihat bahwa tanah di Blok Mayasih merupakan tanah kepemilikan Ibunya Ratu Siti Djenar Alibassa. Adanya perbedaan pandangan akan ruang antara kedua belah pihak lantas menyebabkan terjadinya persengketaan tanah, keduanya saling memperebutkan ruang yang merupakan entitas politik.

Penelitian ini membahas tentang produksi ruang yang dilakukan oleh masyarakat adat AKUR Cigugur dan Djaka Rumantaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditujukan untuk mengeksplorasi dan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang produksi ruang dalam kasus ini. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa tanah di Blok Mayasih tersebut di produksi oleh seorang seniman masyarakat adat AKUR Cigugur untuk menjadi rumah dinas atau rumah satellite yang mendukung kegiatan di Paseban Tri Panca Tunggal. Sedangkan Djaka Rumantaka memproduksi ruang dengan cara membuat bukti kepemilikan administratif dan jalur hukum. Dengan bukti yang dia miliki Djaka Rumantaka membuat abstraksi ruang di pengadilan yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan kepemilikan Ratu Siti Djenar Alibassa yang ditempati oleh pihak ketiga. Penelitian ini mempertegas bahwa ruang merupakan produk politik dan hukum memiliki peran vital dalam memproduksi dan legitimasi ruang.

Kata Kunci : Produksi Ruang , Masyarakat Adat, Tanah *Ulayat*, Politik Ruang.

## Abstract

**Reynaldi Istanto, 2018, The Production of *Ulayat* Space : Case Study Dispute Over *Ulayat* Land in Blok Mayasih, Cigugur Sub-district. Supervisor : Dr. Sholih Mu'adi , SH, M.Si dan Ibnu Asqori Pohan, S.Sos, M.A.**

---

As indigenous peoples AKUR Cigugur owns *ulayat* land devoted to communal interests that can not be owned and shared inheritance. Currently one of the *ulayat* land of AKUR Cigugur society is having a dispute with one of the descendants of the traditional figure Djaka Rumantaka who sees that the land in the Blok Mayasih is ownership of his mother Ratu Siti Djenar Alibassa. The difference of perceived space led to land dispute between AKUR Cigugur society and Djaka Rumantaka, both of them are vying for the space which is political entity.

This research discusses about the production of space which made by AKUR Cigugur society and Djaka Rumantaka. Moreover this research used a qualitative approach that aimed to explore and gain deep understanding of production space in this case. The result of this research found that the land in Blok Mayasih produced by an artist of indigenous people to be a home office or home satellite which support the activities in Paseban Tri Panca Tunggal. Meanwhile Djaka Rumantaka produces space by making proof of administrative ownership and legal path. With the evidence that he owned, Djaka Rumantaka create a space abstraction in the court which stating that the land belongs to Ratu Siti Djenar Alibassa which occupied by the third party. This research reinforces that space is a political product and the law has a important role in producing and legitimating space.

Keywords : Production of Space, Indigenous People, *Ulayat* Land, Political Space.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya lah peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “PRODUKSI RUANG ADAT *ULAYAT*: STUDI KASUS SENGKETA PEREBUTAN TANAH *ULAYAT* DI BLOK MAYASIH KECAMATAN CIGUGUR” dengan tepat waktu. Menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan penelitian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pelbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Andy Istanto dan Ibu Zalvia Zesmi Corpitasari selaku kedua orang tua beserta keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungannya dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Sholih Mu’adi, S.H., M.Si selaku ketua jurusan PPHI dan Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah membantu memberikan arahan dan dukungan sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Ibnu Asqori Pohan, S.Sos., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak arahan dan nasihat selama proses penyusunan penelitian skripsi ini sehingga peneliti dapat menuliskan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Tri Hendra Wahyudi, S.IP., M.IP selaku Dosen Penguji I ujian skripsi yang telah memberikan masukan dan kritikan terhadap penelitian ini demi menyempurnakan penulisan skripsi.
5. Bapak Ahmad Hasan Ubaid, S.IP., M.IP selaku Dosen Penguji II ujian skripsi yang telah memberikan arahan dan kritikan demi menyempurnakan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh masyarakat adat AKUR Cigugur yang telah menerima peneliti dengan baik selama proses penelitian ini.
7. Seluruh Ahli yang telah memberikan arahan dan masukan serta menjadi teman diskusi peneliti selama proses penelitian ini.
8. Teman-teman Universitas Indonesia yaitu Medina Putri, Istiara Henoviota dan Irena Lucy Ishiomora yang telah membantu menghubungkan peneliti dengan para ahli dari Universitas Indonesia.
9. Teman-teman Ksatria Tua yang telah menjadi teman mengerjakan skripsi dan selalu memberikan dukungan kepada peneliti selama proses penyelesaian skripsi.
10. Teman-teman Lembar Harapan yang telah menjadi teman peneliti dan memberikan dukungan untuk terus berkontribusi bagi masyarakat sekitar melalui lembaran harapan kita.

11. BEM FISIP UB Kabinet Gerak Juang 2015 yang mengisi tahun-tahun peneliti untuk berkembang menjadi individu yang lebih baik dan memberikan dampak yang positif di masyarakat.
12. WOLF BASKETBALL FISIP UB yang telah menjadi tempat peneliti untuk berkembang dan berlatih basket selama berkuliah di Universitas Brawijaya.
13. Teman-teman Ilmu Politik terutama Eka Oggy Supriyadi, Helena Yolanda Marito, Fauzha Faradhita, Siti Maidina Herdiyanti, Dian Vitaloka, Liliani Novelisadewi dan lainnya yang tidak dapat peneliti tuliskan satu persatu.
14. Teman-teman Kos Jayadipa yang telah menjadi keluarga baru peneliti selama berkuliah di Universitas Brawijaya dan memberikan dukungan selama penyelesaian skripsi ini.
15. Teman-teman Dari Kita Untuk James yaitu Kak Lalu Sastra, Kak Kirana, Theresia Intan, Roni dan Tita yang telah memberikan dukungan dan memberikan pembelajaran sosial bagi peneliti.

Akhir kata peneliti mengucapkan semoga penelitian skripsi ini sesuai dengan apa yang diharapkan dan memberikan pengetahuan baru terhadap dunia pendidikan dan sebagai referensi baru bagi ilmu pendidikan. Namun, peneliti menyadari bahwa tulisan ini belum sempurna karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu mohon maaf atas segala kesalahan penulisan. Saran dan kritik yang membangun diharapkan dari pembaca untuk menyempurnakan tulisan dan penelitian ini. Diucapkan terima kasih kepada seluruh pembaca, semoga tulisan ini dapat bermanfaat

Malang, 05 Maret 2018

Reynaldi Istanto



## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....  | i   |
| TANDA PENGESAHAN SKRIPSI .....   | ii  |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....  | iii |
| Abstrak .....  | iv  |
| Abstract .....   | v   |
| KATA PENGANTAR .....   | vi  |
| BAB I PENDAHULUAN .....  | 1   |
| 1.1    Latar Belakang .....  | 1   |
| 1.2    Rumusan Masalah .....   | 7   |
| 1.3    Tujuan Penelitian .....   | 7   |
| 1.4    Manfaat Penelitian .....  | 8   |
| 1.4.1    Manfaat Teoritis .....  | 8   |
| 1.4.2    Manfaat Praktis .....   | 8   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....  | 9   |
| 2.1    Kerangka Teori .....  | 9   |
| 2.1.1    Teori Produksi Ruang .....  | 9   |
| 2.1.2    Klasifikasi Ruang .....   | 15  |
| 2.2    Batasan dan Definisi Konseptual .....   | 17  |
| 2.2.1    Produksi Ruang Adat <i>Ulayat</i> .....   | 17  |
| 2.2.2    Masyarakat Adat .....   | 18  |
| 2.2.2    Hak <i>Ulayat</i> .....   | 20  |
| 2.3    Penelitian Terdahulu .....  | 22  |
| 2.3.1    Perspektif Ruang Sebagai Entitas Budaya Lokal (Orientasi Simbolik Ruang Masyarakat Tradisional Desa Adat Panglipuran, Bangli – Bali) .....  | 22  |
| 2.3.2    Proses Perubahan Ruang Akibat Konflik (Studi Kasus : Kawasan Kampung Bajo Sulawesi Selatan) .....   | 24  |
| 2.3.3    Membayangkan Adat : Suatu Kajian Tentang Tanah Adat, Sengketa dan Penyelesaian di Kotamadya dan Kabupaten Jayapura, Provinsi Jayapura. .... | 26  |
| 2.3.4    Ruang dan Konflik Wilayah: Cerita dari Enam Desa .....  | 27  |

|                                    |   |    |
|------------------------------------|---|----|
| 2.3.5                              | Kajian Ruang Liminal pada Konsep Teritori Pemukiman Adat Sunda Cigugur Melalui Analisis Ritual “Ngajayak” ..... | 29 |
| 2.3.6                              | <i>Literature Review</i> .....  | 31 |
| 2.4                                | Kerangka Pemikiran .....  | 36 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... |   | 38 |
| 3.1                                | Metode Penelitian .....   | 38 |
| 3.2                                | Fokus Penelitian.....   | 39 |
| 3.3                                | Lokasi Penelitian.....  | 40 |
| 3.4                                | Metode Pengumpulan Data.....  | 40 |
| 3.5                                | Sumber Data .....   | 43 |
| 3.6                                | Metode Pemilihan Informan .....   | 44 |
| 3.7                                | Metode Analisis Data.....   | 46 |
| 3.8                                | Metode Keabsahan Data .....   | 48 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM .....         |   | 50 |
| 4.1                                | Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Cigugur .....  | 50 |
| 4.2                                | Silsilah Keturunan Pangeran Madrais Sadewa Alibassa .....   | 57 |
| BAB V PEMBAHASAN .....             |   | 62 |
| 5.1                                | Tanah <i>Ulayat</i> Perspektif Masyarakat AKUR Cigugur .....  | 62 |
| 5.1.1                              | Kosmologi Ruang Masyarakat AKUR Cigugur .....   | 65 |
| 5.2                                | Produksi Ruang Blok Mayasih oleh Masyarakat AKUR Cigugur ..   | 67 |
| 5.2.1                              | Analisis Produksi Ruang Blok Mayasih Masyarakat Adat AKUR Cigugur .....   | 75 |
| 5.3                                | Produksi Ruang Blok Mayasih oleh Djaka Rumantaka.....   | 78 |
| 5.3.1                              | Analisis Produksi Ruang Blok Mayasih oleh Djaka Rumantaka ....  | 85 |
| 5.4                                | Politik Ruang Tanah <i>Ulayat</i> Blok Mayasih .....  | 86 |
| BAB VI PENUTUP .....               |   | 93 |
| 6.1                                | Kesimpulan.....   | 93 |
| 6.2                                | Rekomendasi .....   | 94 |
| DAFTAR PUSTAKA .....               |   | 95 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN.....             |   | 99 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Gambar 2.1 Triad Konseptual Lefebvre.....</b>         | <b>13</b> |
| <b>Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran .....</b>               | <b>37</b> |
| <b>Gambar 5.1 Rumah Sengketa Blok Mayasih .....</b>      | <b>68</b> |
| <b>Gambar 5.2 Relief Rumah Blok Mayasih .....</b>        | <b>72</b> |
| <b>Gambar 5.3 Patung-Patung Rumah Blok Mayasih .....</b> | <b>73</b> |

## **DAFTAR TABEL**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Tabel 2.1 Matriks Perbandingan Penelitian .....</b>                         | <b>34</b> |
| <b>Tabel 3.1 Daftar Informan .....</b>   | <b>45</b> |
| <b>Tabel 5.1 Perbedaan Pandangan Masyarakat Adat dan Djaka Rumantaka .....</b> | <b>87</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara multi-etnis yang kaya akan masyarakat adatnya. Jumlah masyarakat adat yang ada di Indonesia menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) kurang lebih adalah 70 juta atau sekitar 20% dari jumlah penduduk Indonesia.<sup>1</sup> Definisi masyarakat adat sendiri berdasarkan Pasal 1 butir 31 UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur dan adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup. Sedangkan berdasarkan Kongres Masyarakat Adat Nusantara I yang diselenggarakan pada tahun 1999 masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum masyarakat adat.<sup>2</sup>

Keberadaan masyarakat adat sendiri telah ada jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, eksistensi masyarakat adat telah diakui secara konstitusional oleh Pemerintah Indonesia dalam Undang-

---

<sup>1</sup>Sri Nurhayati Qodriyatun. 2015. *Pengabaian Negara Atas Masyarakat Adat*. Jakarta : Info Singkat Kesejahteraan Sosial DPR RI Vol. VII, No. 06/II/P3DI/Maret 2015 .

<sup>2</sup> Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. 2016. *Profil Aliansi Masyarakat Adat Nusantara*. Diakses dari [www.aman.or.id/wp-content/uploads/2017/02/PROFIL-AMAN\\_Update\\_Bahasa\\_Oct2016.pdf](http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2017/02/PROFIL-AMAN_Update_Bahasa_Oct2016.pdf) pada 17 September 2017 pukul 16.10 WIB

Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 18B ayat 2 yang menyatakan bahwa negara, secara tegas, mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hak – hak masyarakat adat merupakan hak alamiah yang lahir dari proses sosial masyarakat adat dan telah diwariskan secara turun temurun.

Masyarakat adat yang ada di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke, umumnya masyarakat adat ini masih sangat menjaga budaya yang diturunkan oleh leluhurnya, agar eksistensi kebudayaan tersebut tidak luntur atau bahkan punah. Salah satu kelompok masyarakat adat yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan adat dari leluhur mereka adalah masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) yang bermukim di kecamatan Cigugur, kabupaten Kuningan, Jawa Barat. AKUR merupakan sekelompok masyarakat adat yang masih berpedoman dengan nilai-nilai lokal dan adat leluhur Sunda sesuai dengan ajaran leluhur pendahulunya.<sup>3</sup>

Masyarakat adat AKUR dahulu dikenal dengan nama komunitas adat Agama Djawa Sunda (ADS). Komunitas adat ini didirikan oleh Pangeran Sadewa Alibasa Kusuma Wijaya Ningrat, yang dikenal dengan Pangeran Madrais atau Kyai Madrais. Ajaran utama yang dikembangkan oleh masyarakat adat AKUR adalah *Percaya Ka Gusti Sikang Sawiji-wiji* (percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa), *Ngaji Badan* (intropeksi diri), *Akur Rukun Jeung Sesama Bangsa* (hidup rukun

---

<sup>3</sup> M. Nuh Nuhriison. 2011. *Paham Madrais/ Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur Kuningan : Studi Tentang Ajaran dan Pelayanan Hak-hak Sipil*. Jakarta : Jurnal Harmoni Volume X, Nomor 3, Juli – September 2011, Puslitbang Kementerian Agama Republik Indonesia.

dengan sesama), *Hirup Ulah Pisah di Mufakat* (mengutamakan musyawarah dan mufakat) dan *Hirup Kuduh Silih Tulungan* (hidup harus saling tolong menolong).<sup>4</sup>

Selain ajaran utama tersebut terdapat ajaran tentang etika yang berupa cara ciri manusia dan cara ciri bangsa. Cara ciri manusia merupakan ajaran perilaku etika untuk setiap masyarakat adat agar dapat menjadi individu yang lebih baik. Sedangkan cara ciri bangsa adalah pedoman untuk masyarakat adat dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Gedung Paseban Tri Panca Tunggal merupakan tempat yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat AKUR Cigugur, tempat ini merupakan pusat aktivitas masyarakat AKUR Cigugur dari masa kepemimpinan Pangeran Madrais. Melalui surat keputusan Direktur Direktorat Sejarah dan Purbakala Republik Indonesia tanggal 14 Desember 1976, No. 3632/C.1/DSP/1976 Paseban Tri Panca Tunggal dijadikan sebagai cagar budaya yang dilindungi. Maka dari itu masyarakat AKUR Cigugur turut pula dijadikan sebagai masyarakat adat yang memiliki karakteristik budaya lokal yang khas.<sup>5</sup> Sebagai masyarakat adat tentunya masyarakat AKUR Cigugur memiliki keistimewaan – keistimewaan khusus, salah satunya adalah hak *ulayat*.

Hak *ulayat* berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 tahun 1999 adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

<sup>5</sup> Mina Holilah. 2015. *Kearifan Ekologis Budaya Lokal Masyarakat Adat Cigugur Sebagai Sumber Belajar IPS*. Bandung : Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 24, No. 2, Edisi Desember 2015.

warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Menurut pendapat Ardiwilaga hak *ulayat* merupakan hak dari masyarakat adat untuk menggunakan dengan bebas tanah – tanah yang dalam lingkungan wilayahnya guna kepentingan persekutuan masyarakat hukum adat dan anggota - anggotanya.<sup>6</sup>

Bagaimana pun tanah bagi masyarakat adat mempunyai fungsi yang sangat penting. Tanah merupakan tempat di mana warga masyarakat adat bertempat tinggal, dan pemberi penghidupan. Dengan adanya hak *ulayat*, masyarakat AKUR Cigugur memiliki kewenangan untuk mengolah tanah-tanah *ulayat* di sekitar mereka yang telah diatur dalam hukum adat setempat demi kepentingan anggotanya.

Konsepsi hak *ulayat* menurut hukum adat terdapat nilai-nilai komunalistik-religius magis yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak yang bersifat pribadi, namun demikian hak *ulayat* bukan hak perorangan.<sup>7</sup> Nilai-nilai religius magis yang terkandung di tanah *ulayat* membuat batas-batas tanah *ulayat* sulit untuk diukur -- mayoritas masih diturunkan berdasarkan mitos dan manuskrip setempat--. Batas-batas tanah *ulayat* yang kurang jelas ini karena sifatnya yang religius magis sering kali menimbulkan konflik persengketaan tanah

---

<sup>6</sup> Nurus Zaman. 2016. *Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum dan Hak Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Refika Aditama, hlm. 94.

<sup>7</sup> Irin Siam Musnita. 2008. *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi di Kabupaten Sorong*. Semarang : Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponogoro.



antara lain: rakyat berhadapan dengan birokrasi, rakyat berhadapan dengan perusahaan negara, rakyat berhadapan dengan perusahaan swasta, dan konflik antara rakyat.<sup>8</sup> Adanya konflik persengketaan tanah terjadi pula di masyarakat adat AKUR Cigugur. Persengketaan tanah yang terjadi di masyarakat Adat Karuhun Urang Cigugur adalah persengketaan tanah antara keturunan Pangeran Madrais dengan masyarakat adat AKUR Cigugur.

Kontestasi persengketaan tanah *ulayat* ini bermula pada tahun 2009 ketika Djaka Rumantaka --salah satu keturunan dari Pangeran Madrais-- menggugat hak kepemilikan tanahnya di daerah blok Mayasih sebagai hak milik pribadi ke Pengadilan Negeri Kuningan.<sup>9</sup> Berdasarkan pengakuan Djaka Rumantaka tanah tersebut merupakan tanah kepemilikan Ibunya yaitu Ratu Siti Djenar Alibassa yang diwariskan oleh Pangeran Tedja Buana pada 17 Mei 1970 melalui pemberitahuan secaran lisan kepada seorang juru tulis yang bernama Murkanda.<sup>10</sup> Namun, Djaka Rumantaka baru mengurus kasus ini pada tahun 2008. Puncaknya Djaka Rumantaka, menggugat masalah ini pada tahun 2009 ke Pengadilan Negeri Kuningan dengan bukti pendukung kepemilikan tanah yang ia miliki.

Pernyataan yang disampaikan oleh Djaka Rumantaka bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh Dewi Kanti selaku *Girang Pangaping* --sesepuh adat-- Adat Karuhun Urang Cigugur. Menurut Dewi Kanti tanah tersebut selama ini telah dipahami sebagai tanah kepemilikan masyarakat adat Cigugur yang

---

<sup>8</sup> *Ibid.*,

<sup>9</sup> Hiski Darmayana. 2017. *Tuntut Pembatalan Eksekusi Lahan Masyarakat Adat Cigugur Tak Henti Berjuang*. Diakses dari <http://jabarkahiji.id/2017/05/20/tuntut-pembatalan-eksekusi-lahan-masyarakat-adat-cigugur-tak-henti-berjuang/> pada tanggal 25 Mei 2018 pukul 17.27 WIB.

<sup>10</sup> *Ibid.*,

diturunkan oleh Pangeran Madrais untuk kepentingan bersama bukan pribadi.<sup>11</sup> Tanah yang digugat oleh Djaka Rumantaka diketahui merupakan rumah keluarga alm. Kusnadi yang selama ini berfungsi menjadi rumah pendukung kegiatan Paseban. Adanya perbedaan pandangan dan pemahaman akan sebuah ruang dan tanah tersebut lantas menyebabkan timbulnya persengketaan antara masyarakat adat AKUR dan Djaka Rumantaka.

Dari pemaparan diatas dapat kita lihat ada tanah yang diperebutkan. Politik ruang menyatakan bahwa tanah merupakan bagian dari ruang yang dapat diperebutkan. Lebih lanjut, menurut Lefebvre ruang adalah sebuah produk politik dan instrumen bagi perubahan sosial ekonomi sehingga ruang itu tidak netral dan pasif.<sup>12</sup> Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa yang diperebutkan oleh masyarakat adat AKUR dan Djaka Rumantaka merupakan sebuah perebutan produk politik.

Penelitian ini lebih dalam akan menganalisis bagaimana produksi ruang adat *ulayat* dalam sengketa perebutan tanah adat yang terjadi antara masyarakat adat AKUR dan Djaka Rumantaka. Adanya perbedaan cara pandang akan ruang antara kedua belah pihak lantas menyebabkan terjadinya persengketaan tanah, kedua belah pihak sama-sama saling melakukan proses produksi ruang yang dimana didalamnya terdapat pelbagai kepentingan. Peneliti memilih sengketa tanah *ulayat* yang terjadi di Cigugur ini karena perebutan tanah *ulayat* antara keturunan tokoh adat dengan masyarakat adat merupakan kasus yang jarang terjadi. Kasus sengketa tanah *ulayat*

---

<sup>11</sup> Muhammad Irfan. 2017. *Tanah Adat Cigugur Terancam Dieksekusi*. Diakses dari <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/05/18/tanah-adat-cigugur-terancam-dieksekusi-401436> pada tanggal 25 Mei 2017 pukul 16.59 WIB.

<sup>12</sup> Siti Aminah. 2015. *Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota di Surabaya*. Jakarta: Lab Sosio Universitas Indonesia.

yang umum terjadi adalah persengketaan tanah antara masyarakat adat dengan negara seperti kasus di Keret Merauje Jayapura yang bersengketa dengan Dinas Kehutanan dan Komunitas adat Kanar dengan Pemerintah di Desa Labuang Badas, Sumbawa ataupun persengketaan antara masyarakat adat dengan perusahaan swasta seperti pada kasus di Mesuji Lampung yang bersengketa dengan PT. Huma Indah Mekar dan Suku Sakai Riau dengan PT. Murini Wood Indah Industri. Maka dari itu persengketaan yang terjadi di Cigugur ini merupakan kasus yang menarik untuk diteliti, karena selayaknya sebagai keturunan masyarakat adat seharusnya memiliki cara pandang yang sama terhadap tanah karena nilai-nilai yang telah diturunkan oleh leluhur.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses produksi ruang yang dilakukan oleh masyarakat adat AKUR Cigugur dan Djaka Rumantaka di tanah *ulayat* Blok Mayasih, kecamatan Cigugur, Kuningan, Jawa Barat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui bagaimana proses produksi ruang yang dilakukan oleh masyarakat adat AKUR Cigugur di tanah *ulayat* Blok Mayasih Kecamatan Kuningan, Jawa Barat.
2. Mengetahui bagaimana proses produksi ruang yang dilakukan oleh Djaka Rumantaka di tanah Blok Mayasih Kecamatan Cigugur, Kuningan, Jawa Barat.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi program studi ilmu politik khususnya dalam politik ruang dan produksi ruang yang dilakukan oleh masyarakat adat.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat Praktis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Dapat memberikan informasi mengenai pemahaman masyarakat adat terhadap tanah *ulayat*.
2. Dapat memberikan pandangan dan rekomendasi kebijakan ruang dari perspektif masyarakat adat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori**

Dalam menganalisis produksi ruang dalam sengketa perebutan tanah *ulayat* di Blok Mayasih Kecamatan Cigugur peneliti akan menggunakan teori *The Production of Space* (Produksi Ruang) dari Henri Lefebvre. Perebutan tanah *ulayat* yang terjadi merupakan permasalahan tata ruang karena perebutan tanah dalam kasus ini memperebutkan sebuah ruang yang mana menjadi sebuah entitas politik.

##### **2.1.1 Teori Produksi Ruang**

Ruang merupakan suatu entitas yang multi tafsir. Pemaknaan ruang telah banyak dirumuskan dalam pelbagai perspektif disiplin ilmu mulai dari ilmu sains, filsafat, hingga ilmu sosial. Penelitian ini akan melihat sebuah ruang dalam kajian ilmu sosial. Salah satu ilmuwan sosial yang memiliki pengaruh cukup besar dalam kajian akan ruang adalah Henri Lefebvre.

Dalam bukunya *The Production of Space* --yang merupakan terjemahan Donald Nicholson Smith dari buku "*La Production de l'espace*"-- Lefebvre mengkaji bagaimana melihat sebuah ruang dan proses produksi ruang. Lefebvre menerangkan bahwa ruang dibentuk secara sosial dan manusia diproduksi secara spasial. Penjelasan Lefebvre tersebut dapat diartikan bahwa sebuah ruang dapat dibentuk oleh manusia dan kegiatan mereka didalamnya, kemudian manusia dan

kegiatannya juga dapat dibentuk oleh ruang tersebut. Bagi Lefebvre ruang sosial bergabung bersama tindakan sosial, baik tindakan yang dilakukan individu maupun kelompok yang lahir dan berkembang bersama ruang tersebut.<sup>13</sup>

Praktik tata ruang tidak dapat terlepas dari keberpihakan aktor yang membuat regulasi tata ruang dan kontestasi yang terjadi didalamnya. Maka dari itu Lefebvre menjelaskan ruang adalah sebuah produk politik dan instrumen bagi perubahan sosial ekonomi sehingga ruang tidak netral dan pasif.<sup>14</sup> Kontestasi yang terjadi dalam perebutan suatu ruang meliputi perjuangan kelas-kelas yang ingin menguasai ruang tersebut. Pelbagai perbedaan fenomena perjuangan kelas untuk menguasai sebuah ruang berkaitan dengan kecenderungan ideologis yang kuat dan melekat sehingga akan menjadi sebuah kepercayaan ilmiah dengan secara tidak sadar dipaksakan oleh kelas dominan.

Dalam membentuk sebuah ruang di masyarakat menurut Lefebvre diperlukan perpaduan antara aspek fisik, aspek mental, dan aspek sosial. Dengan perpaduan tiga unsur tersebut maka Lefebvre mengelaborasi aspek ruang-ruang bangunan (fisik), gagasan dan konsep dari ruang (mental) dan gagasan sebagai bagian dari interaksi sosial yang akan menjadi fundamental dari konsep triadik produksi ruang Lefebvre yaitu *perceived*, *conceived* dan *lived space*.<sup>15</sup>

Terdapat tiga acuan dasar sebagai pemahaman mengenai konsep ruang yakni *perceived space*, *conceived space* dan *lived space*. *Perceived space*

---

<sup>13</sup> Henri Lefebvre. 1991. *The Production of Space*. United Kingdom : Basil Blackwell, hlm.33

<sup>14</sup> Siti Aminah. *Op.cit*

<sup>15</sup> Kosa Lazawardi. 2012. *Ruang yang Tercipta oleh Para Pesepeda (Studi Kasus: Bundaran Hotel Indonesia pada Acara Car Free Day)*. Depok: Universitas Indonesia

merupakan ruang yang dirasakan oleh panca indera manusia. Ruang terbentuk dari apa yang dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Pengalaman berulang-ulang yang dirasakan kemudian lahir menjadi sebuah ruang persepsi atau yang biasa disebut *perceived space*. Selanjutnya ada *conceived space* yang menurut Lefebvre ruang tidak hanya dipahami sebagai sebuah persepsi, akan tetapi ruang menjadi lebih dapat dipahami dengan pemberian pemahaman terhadap ruang itu sendiri. *Conceived space* merupakan perpaduan dari pengalaman yang sudah dialami dan dirasakan oleh individu yang akhirnya menimbulkan konsepsi akan ruang. Maka dari itu *conceived space* biasa lebih bersifat subjektif karena setiap orang memiliki imajinasi yang berbeda-beda. Terakhir adalah *lived space* yang berarti ruang dimana interaksi antar manusia dapat tercipta dengan cara yang berbeda-beda. *Lived space* adalah penggabungan antara *perceived* dan *conceived space* yang selanjutnya berakhir pada interaksi sosial.<sup>16</sup>

Secara lebih mendalam dapat dijelaskan bahwa ketiga konsep Lefebvre tersebut merupakan teori kunci dari bukunya yang berjudul *The Production of Space*. Teori ini disebut pula dengan Tiga Triad Spasial, berikut ini penjelasan lebih dalam dari teori tersebut :

#### 1. *Spatial Practice Perceived*

*Spatial Practice Perceived* atau *perceived space* adalah kebutuhan ruang yang sifatnya dapat dirasakan oleh panca indera manusia. *Spatial practice perceived* merujuk pada dimensi material dari aktivitas sosial dan kegiatan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*,

saling berinteraksi dalam sebuah ruang. Konsep ini sering dijadikan dasar pembuatan regulasi tata ruang oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan ruang di masyarakat karena berkaitan dengan suatu produksi ruang dan kebutuhan masyarakat.

## 2. *Representations of Space Conceived*

*Representations of Space Conceived* merupakan sebuah ruang yang dikonseptualisasikan. Ruang ini terbentuk karena pengalaman dan interaksi sosial yang terjadi pada suatu ruang, dan pada akhirnya melahirkan konsepsi pemaknaan ruang. Gambaran dari konseptualisasi sebuah ruang menciptakan representasi kebutuhan ruang yang berdasar pada kegunaannya. Maka dari itu komponen-komponen dan tanda-tanda yang berhubungan dengan ruang tersebut menjadi *representations of space conceived*.

## 3. *Representational of Space Lived*

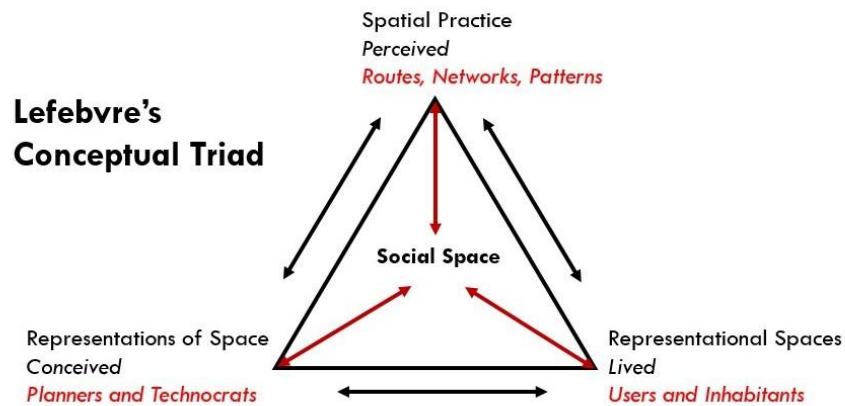
*Representational of Space Lived* merupakan gabungan dari dua konsep sebelumnya. Bagi Lefebvre *representational of space lived* atau *lived space* ini merupakan tempat hidup penduduk dan pengguna ruang. Pengalaman-pengalaman individu atas sebuah ruang membentuk sebuah ideologi akan persepsi sebuah ruang yang memungkinkan terbentuknya sebuah ruang-ruang baru dan berbeda. Maka dari itu ruang ini merupakan ruang yang terdominasi oleh tamsilan dan simbol tertentu.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ucu Martanto. 2012. *Ruang dan Konflik Cerita dari Enam Desa*. Yogyakarta : CSPA Universitas Gadjah Mada



**Gambar 2.1 Triad Konseptual Lefebvre**



Sumber : [umich.edu/up650/home/triad.jpg](http://umich.edu/up650/home/triad.jpg)

Berdasarkan skema gambar diatas, ruang sosial dapat dianalisa melalui Tiga Triad Spasial.<sup>18</sup> Pertama ruang sosial muncul dalam dimensi praktik spasial sebagai penghubung atau jaringan dari sebuah aktivitas atau interaksi yang bergantung pada aspek material (morfologi dan lingkungan binaan). Kedua, representasi ruang berfungsi sebagai kerangka acuan untuk komunikasi, yang berorientasi (spasial) dan selanjutnya akan menentukan aktivitas yang terjadi di dalamnya. Pada bagian ketiga, "pesan" material yang muncul di lapangan bisa menjadi alat untuk menyampaikan makna. Pada tahap ini simbol-simbol yang berkembang dalam ruang mengekspresikan dan menimbulkan norma, nilai, dan pengalaman sosial.

Pada dasarnya ketiga konsep triad spasial Lefebvre memiliki hubungan satu dengan yang lainnya.<sup>19</sup> Konsep Triadik Lefebvre merupakan sesuatu yang bersifat

<sup>18</sup> Kanishka Goonewardana, *et.al.* 2008. *Space, Difference , Everyday Life*. New York : Routledge, hlm. 37

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 41

determinan: ruang muncul hanya dalam pengaruh-mempengaruhi di antara ketiganya. Sehingga dalam melihat sebuah ruang, tidak melihat tahap-tahap tersebut sendiri-sendiri namun perlu melihatnya sebagai sebuah kesatuan.

Mengacu pada Lefebvre yang mengamati ruang berdasarkan triad konseptualnya, “*spatial practice perceived*” yang menyoroti hidup dalam ruang, “*representations of space conceived*” yang mencerminkan konsepsi dan ketertiban yang berpusat pada negara, serta “*representational space lived*” yang mewujudkan cara-cara di mana ruang dirasakan dari perspektif warga negara. Berangkat dari alasan tersebut Franz Von Benda Beckmann, Keebet von Benda Beckmann dan Anne Griffiths, pada konteks ruang melihat hukum adalah alat yang ampuh yang terus-menerus dibuat dan digunakan dalam pelbagai cara oleh aktor sosial yang berbeda untuk menciptakan kerangka kerja pelaksanaan kekuasaan dan kontrol atas masyarakat dan sumber daya pada skala yang bervariasi.<sup>20</sup>

Gagasan tentang ruang memberikan lensa penting dalam memandang hukum. Hukum merupakan cara terpenting untuk mengkonstruksi, mengorganisir, dan melegitimasi ruang dan batas-batasnya.<sup>21</sup> Hal ini disebabkan hukum menyediakan sebuah landasan, pengaturan fisik, maupun alam semesta yang tidak berwujud, yang mana untuk menemukan beragam cara dimana hubungan sosial diciptakan dan diatur dengan efek yang berbeda.

---

<sup>20</sup> Franz von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann and Anne Griffiths. 2009. *Spatializing Law*. England: Ashgate Publishing Limited, hlm. 3

<sup>21</sup> *Ibid.*,

Sistem hukum menentukan klaim mereka sendiri terhadap validitas di ruang sosial dan fisik. Hukum mendefinisikan batas dan wilayah di mana ia mengklaim validitas dan yang menjadi kriteria yang relevan untuk warga negara. Sebagian besar ruang yang diciptakan atas dasar hukum ini memiliki batasan yang jelas. Hukum juga digunakan untuk menciptakan ruang dengan tujuan yang lebih spesifik dengan rezim hukum khusus yang dilapiskan pada jaringan politik dan administratif geografis umum ini, seperti zona ekonomi, zona untuk zona perencanaan kota, 'masalah' atau 'keamanan', zona yang terkait dengan sumber daya manajemen, seperti masyarakat desa, hutan, daerah pertanian, reservasi alam dan lahan lapang, atau bidang properti yang dibatasi dalam sistem pendaftaran kadaster.<sup>22</sup> Maka dari itu dalam mengeksplorasi keterkaitan antara ruang sosial, hukum dan fisik, hukum merepresentasikan arena di mana politik ruang diberlakukan dan dinegosiasikan.

### **2.1.2 Klasifikasi Ruang**

Ketika sebuah ruang diproduksi, ruang tersebut akan berkaitan erat dengan sejarah.<sup>23</sup> Ruang merupakan produksi dari sejarah karena ketika bersinggungan dengan waktu, ruang secara sadar maupun tidak akan mengalami perubahan. Maka dari itu Lefebvre mengklasifikasikan ruang berdasarkan periodisasi ruang. Pertama ada *natural space* atau yang biasa disebut dengan ruang alamiah, ruang ini merupakan ruang yang tercipta alami oleh alam.

Berikutnya adalah *absolute space* atau ruang mutlak, ruang ini merupakan ruang asli atau mutlak yang diciptakan oleh Tuhan. Ruang ini tidak mengalami

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.5

<sup>23</sup> Henri Lefebvre. *Op.cit* hlm. 46

kolonialisasi dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi politik. Awal mula terciptanya *absolute space* menurut Lefebvre adalah ketika ruang-ruang yang dieksploitasi dan dinamai oleh rakyat kecil petani atau penggembala nomaden maupun semi nomaden. Lalu suatu saat datang seorang tuan yang memberikan sebuah peran baru, menjadikan ruang tersebut yang suci dan ditanamkan bahwa ruang ini memang sudah berdasarkan keadaan alamiahnya. Berikut ini penjelasan Lefebvre mengenai asal mula *absolute space* dalam bukunya *The Production of Space* :<sup>24</sup>

“*The cradle of absolute space - its origin, if we are to use that term - is a fragment of agro-pastoral space, a set of places named and exploited by peasants, or by nomadic or semi-nomadic pastoralists. A moment comes when, through the actions of masters or conquerors, a part of this space is assigned a new role, and henceforward appears as transcendent, as sacred (i.e. inhabited by divine forces), as magical and cosmic. The paradox here, however, is that it continues to be perceived as part of nature.*”

Selanjutnya ada *abstract space* atau ruang abstrak yang sebetulnya serupa dengan *representation of space*. Ruang ini merupakan ruang yang dibentuk oleh perencana kota, arsitek dan lain sebagainya. Namun, ruang abstrak tidak hanya sekedar bersifat ideasional. *Abstract space* bukan hanya ditandai oleh tidak adanya hal-hal yang diasosiasikan dengan *absolute space*, tetapi lebih jauh ruang ini adalah ruang yang diduduki, didominasi dan dikendalikan. *Abstract space* menciptakan bentuk-bentuk homogenisasi, hierarki, dan pelbagai macam fragmentasi sosial lainnya.

Terakhir ada *differential space*, merupakan ruang yang menitikberatkan pada perbedaan dan kebebasan dari kontrol dan dominasi sebagaimana dalam

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 234

*abstract space*. Jatuhnya *abstract space* disebabkan karena adanya kontradiksi akan ruang abstrak yang terbangun cenderung mengarah ke homogenitas, menuju penghapusan perbedaan atau perbedaan yang ada, ruang baru tidak dapat terlahir (diproduksi) kecuali jika ia menonjolkan perbedaan.<sup>25</sup>

## **2.2 Batasan dan Definisi Konseptual**

Produksi ruang adat *ulayat* yang dilakukan oleh masyarakat adat merupakan suatu kajian atau bahasan utama dalam penelitian ini. Adanya batasan dan definisi konseptual ditujukan untuk menjelaskan batasan dan penelitian serta konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar sebuah penelitian tidak melebar terlalu jauh dan dapat menemukan jawaban dari rumusan masalah yang telah diangkat.

Maka dari itu dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa konsep yang berkaitan dengan pokok pembahasan agar dapat menjelaskan kepada pembaca mengenai definisi-definisi utama untuk memberikan suatu pemahaman.

### **2.2.1 Produksi Ruang Adat *Ulayat***

Untuk memproduksi sebuah ruang di masyarakat menurut Lefebvre diperlukan perpaduan antara aspek fisik, aspek mental, dan aspek sosial. Dengan perpaduan tiga unsur tersebut maka Lefebvre mengelaborasi aspek ruang-ruang bangunan (fisik), gagasan dan konsep dari ruang (mental) dan gagasan sebagai bagian dari interaksi sosial yang akan menjadi fundamental dari konsep triadik

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 52

produksi ruang Lefebvre yaitu *perceived, conceived* dan *lived space*.<sup>26</sup> Produksi ruang adat *ulayat* yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah serangkaian proses masyarakat adat dalam memproduksi sebuah ruang diatas tanah adat *ulayat* mereka.

### 2.2.2 Masyarakat Adat

Istilah masyarakat adat mulai terkenal di dunia ketika International Labour Organization (ILO) --salah satu badan Perserikatan Bangsa Bangsa-- mulai memperkenalkan isu *indigenous people* atau masyarakat adat pada tahun 1950-an.<sup>27</sup> Setelah isu ini dipopulerkan oleh ILO sebagai isu global, pelbagai lembaga tinggi internasional seperti World Bank mulai menjadikan isu tersebut sebagai proyek pendanaan pembangunan di beberapa negara. Berdasarkan Konvesi ILO No.169 Tahun 1989 *indigenous people* atau masyarakat adat didefinisikan sebagai masyarakat yang berdiam di negara-negara merdeka dimana masyarakat tersebut memiliki kondisi sosial, ekonomi dan kultural yang membedakan diri mereka dengan masyarakat lain di negara tersebut serta memiliki peraturan, tradisi yang telah diatur berdasarkan hukum adat.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) melalui Kongres Masyarakat Adat Nusantara I pada tahun 1999 mendefinisikan masyarakat adat sebagai kelompok masyarakat yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga

---

<sup>26</sup> Henri Lefebvre, *Loc.cit*

<sup>27</sup> Besse Sugiswati. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat di Indonesia*. Jurnal Perspektif Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari.

adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.<sup>28</sup> Lebih lanjut menurut Martua Sirait, *et.al* mendefinisikan masyarakat adat sebagai satu kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah adat yang bersifat otonom, dimana mereka mengatur sistem kehidupannya secara mandiri seperti hukum, politik, dan ekonomi.<sup>29</sup>

Berdasarkan Pasal 1 butir 31 UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masyarakat adat diartikan sebagai kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu secara turun-temurun karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum. Dari beberapa penjabaran diatas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang bermukim di suatu wilayah adat, dan hidup dengan berpedoman kepada asal usul leluhur, serta memiliki hukum adat yang ditujukan untuk mengatur sistem kehidupan masyarakat adat.

Menurut I.G.N. Sugangga di Indonesia terdapat 3 (tiga) jenis sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakat adat yaitu : <sup>30</sup>

- a. Sistem Patrilineal, dalam sistem ini masyarakat adat menarik garis keturunan ke atas melalui bapak. Bapak dari bapak terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya.

---

<sup>28</sup> Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). 2016. Diakses dari [www.aman.or.id/.../PROFIL-AMAN\\_Update\\_Bahasa\\_Oct2016.pdf](http://www.aman.or.id/.../PROFIL-AMAN_Update_Bahasa_Oct2016.pdf) pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 12.28 WIB

<sup>29</sup> Besse Sugiwati, *op.cit.*

<sup>30</sup> Irin Siam Musnita, *op.cit*

b. Sistem Matrilineal, merupakan suatu sistem di mana masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui garis ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya.

c. Sistem Parental atau Bilateral adalah masyarakat hukum di mana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak dan garis ibu, sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai moyangnya

Dalam penelitian ini, masyarakat adat yang akan menjadi objek analisis peneliti adalah masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR). Masyarakat adat ini bermukim di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat dan dipimpin oleh seorang ketua adat bernama Pangeran Djatikusumah.

### **2.2.2 Hak Ulayat**

Keberadaan masyarakat adat telah diakui secara tegas oleh pemerintah Indonesia beserta hak-hak tradisionalnya. Salah satu hak masyarakat adat yang diakui pemerintah adalah hak untuk mengelola sebuah tanah atau yang biasa dikenal dengan istilah hak *ulayat*. Pengertian hak *ulayat* menurut B.F Sihombing yang dikutip dari Nurus Zaman dalam bukunya *Politik Hukum Pengadaan Tanah* adalah hak penguasaan dan pemilikan sebidang tanah yang hidup dalam masyarakat adat pada masa lampau maupun masa kini.<sup>31</sup> Tanah adat ini terkadang tidak mempunyai bukti kepemilikan secara autentik, bukti kepemilikan yang dimiliki terkadang hanya berdasarkan pengakuan atau tidak tertulis.

---

<sup>31</sup> Nurus Zaman. *Op.cit*, hlm. 95



Merujuk pada Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak *Ulayat* Masyarakat Hukum Adat definisi *hak ulayat* adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup. Peraturan menteri ini lebih lanjut merinci tentang ketentuan *hak ulayat* masyarakat hukum adat pada Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

Hak *ulayat* masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :

1. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari ;
2. Terdapat tanah *ulayat* tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari ; dan
3. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah *ulayat* yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Umumnya batasan territorial hak *ulayat* masyarakat adat sukar untuk ditentukan secara pasti. Hal ini disebabkan karena dalam hak *ulayat* tersebut mengandung nilai-nilai komunalistik religius magis, yang menyebabkan batasan-

batasan yang ada terkadang hanya berdasarkan pengakuan tanpa adanya bukti yang kuat.

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang politik ruang telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Namun, penelitian yang mengaitkan politik ruang dalam ruang adat masih sangat minim untuk didapatkan. Adapula lima penelitian yang dapat dijadikan rujukan penelitian terdahulu bagi penelitian ini adalah :

#### **2.3.1 Perspektif Ruang Sebagai Entitas Budaya Lokal (Orientasi Simbolik**

##### **Ruang Masyarakat Tradisional Desa Adat Panglipuran, Bangli – Bali)**

Penelitian ini dilakukan oleh Wahyudi Arimbawa dan I Komang Gede Santhyasa, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia. Jurnal ini diterbitkan Local Wisdom Jurnal Ilmiah Online Volume II pada bulan Desember tahun 2010. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi Arimbawa dan I Komang Gede Santhyasa berusaha untuk memaparkan pola dan struktur ruang yang terbentuk akibat dari perspektif masyarakat Desa Adat Penglipuran terhadap orientasi ruang permukimannya.

Teori yang digunakan oleh Wahyudi dan I Komang adalah teori ruang dari Amos Rapoport yang biasa digunakan dalam lingkup kajian arsitektur lingkungan. Rapoport mengungkapkan pengaruh ruang terhadap perilaku manusia adalah fungsi dan penggunaan dari ruang dirancang untuk memenuhi suatu tujuan baik tujuan yang spesifik maupun tujuan yang fleksibel. Sehingga ruang bisa saja diciptakan demi kepentingan yang sifatnya temporer.

Lebih dalam Wahyudi dan I Komang pada penelitian ini mengkaji ruang dari perspektif etnografi. Metode etnografi digunakan agar mereka dapat menggali konsep kosmologi ruang, filosofis, pola perilaku, kebiasaan, pandangan hidup, serta norma dan landasan fundamental budaya lokal yang terkait dengan orientasi tatanan ruang Desa Adat Penglipuran, Bangli. Metode penelitian yang digunakan Wahyudi dan I Komang adalah deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk menghasilkan data deskriptif dari narasumber atau obyek yang diamati.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan I Komang menyimpulkan bahwa perwujudan pola dan struktur ruang di Desa Adat Panglipuran Bali dilatarbelakangi oleh pengaruh agama Hindu dengan berlandaskan pada tiga kerangka dasar yaitu Tattwa (Filosofis), Tata susila (etika), dan upacara (ritual). Secara konseptual, orientasi penataan ruang dalam permukiman tradisional Desa Adat Penglipuran berkaitan dengan aspek tata susila (etika), dimana didalamnya terdapat landasan fundamental tentang upaya untuk memisahkan ruang-ruang yang bersifat sakral dengan ruang yang berfungsi kegiatan nista. Sedangkan secara praktis, orientasi ruang permukiman tradisional Desa Adat Penglipuran dibagi menjadi dua yaitu konsep arah orientasi yaitu sumbu bumi (kaja-kelod/gunung-laut) dan sumbu religi (kangin-kauh/matahari terbit-terbenam) yang melahirkan konsep ruang Panca Mandala. Nilai ruang utama pada sumbu bumi berada pada daerah utara (gunung) dan nilai ruang nista pada daerah selatan (laut), sedangkan nilai ruang utama pada sumbu religi berada pada daerah timur (matahari terbit) dan nilai ruang nista berada pada daerah barat (matahari terbenam).

### **2.3.2 Proses Perubahan Ruang Akibat Konflik (Studi Kasus : Kawasan Kampung Bajo Sulawesi Selatan)**

Penelitian ini merupakan hasil *Prosiding* Temu Ilmiah IPLBI pada tahun 2015 yang dilakukan oleh Syahriana Syam dan Syahrianti S. Dalam penelitian ini Syahriana dan Syahrianti membahas tentang proses perubahan ruang yang terjadi akibat konflik kepentingan di Kampung Bajo Sulawesi Selatan. Penelitian ini ditujukan untuk menyempurnakan teori tentang deskripsi proses perubahan ruang secara arsitektur akibat konflik kepentingan.

Teori yang digunakan oleh Syahriana Syam dan Syahrianti untuk menganalisis proses perubahan ruang akibat konflik kepentingan adalah teori produksi ruang Lefebvre dan teori konflik Ralf Dahrendorf. Teori produksi ruang Lefebvre berbicara mengenai ruang sebagai produk sosial. Menurutnya, ruang diproduksi secara sosial, sementara manusia diproduksi secara spasial. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa ruang dibentuk oleh manusia dan kegiatan di dalamnya, sedangkan manusia dan kegiatannya kemudian juga dibentuk oleh ruang tersebut. Teori produksi ruang dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis perubahan pola ruang yang terjadi di Kampung Bajo. Lebih lanjut untuk menganalisis konflik yang terjadi Syahriana Syam dan Syahrianti menggunakan teori konflik dari Ralf Dahrendorf yang melihat terjadi suatu konflik disebabkan karena : <sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Syahriana Syam dan Syahrianti. 2015. *Proses Perubahan Ruang Akibat Konflik (Studi Kasus : Kawasan Kampung Bajo Sulawesi Selatan)*. Prosiding Temu Ilmiah IPLBI

1. Setiap masyarakat dalam segala hal tunduk dalam proses perubahan, karena perubahan sosial terjadi di mana saja.
2. Setiap masyarakat dalam segala hal memperlihatkan ketidaksesuaian dan konflik sosial terdapat dimana saja.
3. Setiap unsur dalam suatu masyarakat memberikan kontribusi terhadap perpecahan dan perubahan.
4. Setiap masyarakat berdasarkan atas penggunaan kekerasan anggotanya terhadap anggota yang lain

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan observasi jejak fisik. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data dari hasil observasi lapangan dan penelusuran arsip, yang berkaitan dengan sejarah keberadaan Kampung Bajo. Sedangkan pendekatan observasi jejak digunakan untuk menjelaskan adanya pengaruh perubahan fisik dan non fisik sebagai latar belakang terjadinya perubahan ruang.

Dari hasil penelitian yang ditemukan oleh Syahrian Syam dan Syahrianti proses perubahan ruang yang terjadi di Kampung Bajo, Sulawesi Selatan disebabkan oleh pelbagai faktor yaitu : adanya pengaruh budaya lain yang masuk, penambahan penghuni, dan konflik kepentingan dan intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal pembangunan fisik. Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah memang secara makro tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap struktur ruang, namun intervensi ini berpengaruh hilangnya makna ruang komunal yang ada dan bergeser menjadi orientasi bisnis. Dari hasil temuan Syahriana Syam dan Syahrianti mereferensikan bahwa intervensi pemerintah dalam

pembangunan fisik hendaknya tetap berakar kepada budaya Suku Bajo sebagai pedoman pengembangan wilayah.

### **2.3.3 Membayangkan Adat : Suatu Kajian Tentang Tanah Adat, Sengketa dan Penyelesaian di Kotamadya dan Kabupaten Jayapura, Provinsi Jayapura.**

Penelitian ini merupakan disertasi Simon Abdi Kari Frank pada tahun 2009 yang ditujukan untuk memenuhi syarat program Doktor Antropologi Universitas Indonesia. Disertasi ini berusaha menjelaskan tentang sengketa perebutan tanah dan penyelesaiannya yang terjadi di Kotamadya dan Kabupaten Jayapura.

Penelitian Simon Abdi bertujuan untuk (1) mengetahui kebijakan-kebijakan yang diterapkan dan digunakan pihak-pihak berkepentingan seperti pemerintah, badan-badan hukum pemerintah dan swasta di bidang pertanahan, (2) mengetahui dan menjelaskan perkembangan aturan, tata nilai adat yang berkaitan dengan penguasaan dan pengelolaan tanah adat (3) mengungkapkan dan menemukan solusi penanganan persengketaan tanah-tanah yang terjadi di Jayapura. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk menghasilkan data deskriptif dari narasumber atau obyek yang diamati. Lebih lanjut untuk menjelaskan aksi-aksi sengketa perebutan sumberdaya tanah yang dikonstruksi masyarakat adat papua penelitian Simon ini menggunakan paradigma konstruktivisme.

Teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini Simon Abdi menggunakan teori pluralisme hukum. Pluralisme hukum dikeluarkan oleh para

sarjana sosial untuk mengkritik hukum monolitik yang terlalu dominan dan memberikan pandangan yang sempit mengenai hukum dan subyeknya yang ada di masyarakat. Sedangkan pluralisme hukum lahir dan berkembang sebagai pendekatan yang komprehensif untuk menjelaskan dan menyelesaikan pelbagai persoalan sengketa maupun non sengketa karena mengkaji keberagaman yang ada dalam masyarakat.

Dari hasil penelitian Simon Abdi Kari Frank melihat dalam rangka mendefinisikan kepentingannya akan sebuah tanah, para pihak menafsirkan aturan-aturan hukum, pemerintah, individu, kelompok masyarakat, badan-badan swasta memaknai dengan undang-undang dan kebijakan pertanahan nasional, sedangkan masyarakat adat berpegang berdasarkan hukum adatnya. Perbedaan tafsir ini lantas menimbulkan suatu sengketa tanah yang berkepanjangan. Dalam pemutusan sengketa tanah peradilan yang digunakan masih hukum normatif saja sehingga persengketaan tetap terus terjadi meskipun telah diputuskan. Maka dari itu Simon Abdi Frank dalam disertasi ini merekomendasikan untuk mengkaji permasalahan pertanahan dengan menggunakan pluralisme hukum sebagai indikator analisis dan membangun tatanan sosial yang lebih berkeadilan.

#### **2.3.4 Ruang dan Konflik Wilayah: Cerita dari Enam Desa**

Penelitian ini dilakukan oleh Ucu Martanto seorang staf pengajar Departemen Politik, FISIP Universitas Airlangga dan *assosiate researcher* pada Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP), Universitas Gadjah Mada. Penelitian Ucu Martanto ini diterbitkan oleh PSKP Universitas Gajah Mada pada tahun 2012. Monograf Ucu Martanto membahas tentang sengketa batas wilayah

antara Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dengan Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dalam memperebutkan status wilayah enam desa (Dum Dum, Akesahu, Akelamo Kao, Tetewang, Bobane Igo, dan Pasir Putih).

Sengketa wilayah merupakan fenomena yang banyak terjadi di Indonesia, adanya sengketa wilayah tidak jarang berujung kepada konflik kekerasan. Dalam menganalisis permasalahan sengketa wilayah ini Ucu Martanto mencoba untuk membedahnya dari pandangan perspektif ruang. Teori yang digunakan Ucu Martanto adalah teori produksi ruang Lefebvre yang menganggap ruang merupakan produk sosial. Dalam penciptaan ruang Lefebvre menganalisisnya melalui tiga proses yang saling terhubung, yaitu: *perceived, conceived, lived*.<sup>33</sup>

Perpindahan penduduk ke Pulau Makian dan aparat pemerintahan desa ke kecamatan wilayah Malifut dan Jailolo berimplikasi terhadap penataan wilayah administratif dan etnisitas antara transmigran (etnis Makian) dengan penduduk lokal (etnis Kao).<sup>34</sup> Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Utara membuat teritorial baru bernama Kecamatan Makian Daratan yang ditujukan untuk tempat tinggal para transmigran. Wilayah ini terletak di wilayah Kecamatan Malifut. Bagi masyarakat lokal, wilayah Kecamatan Makian Daratan merupakan tanah adat yang dipinjamkan kepada etnis Makian. Namun, konsepsi akan hak atas tanah ini berbeda dengan yang diamini oleh pemerintah. Perbedaan pandangan terhadap sebuah ruang tersebut menyebabkan kontestasi ruang dan praktek spasial antara transmigran dan penduduk lokal untuk menguasai daerah tersebut.

---

<sup>33</sup> Ucu Martanto. *Op.cit*

<sup>34</sup> *Ibid.*,



Konflik yang terjadi di Kecamatan Makian Daratan diperparah dengan terjadinya peningkatan kesenjangan ekonomi antara para transmigran dan penduduk lokal. Pemerintah dan para pembuat kebijakan dalam kasus ini menggelar praktik politik atas representasi ruang dengan cara memberikan pernyataan saintifik dan teknologi politik seperti: sistem administrasi kependudukan, regulasi, institusi sosial, dan cara-cara lainnya.

Konflik ruang di enam desa Halmahera akhirnya mengalami eskalasi menjadi konflik agama antara etnis Makian dan etnis Kao. Etnis Makian yang beragama Islam dan Etnis Kao beragama Kristen mempermudah untuk menggeser isu konflik ruang di Maluku Utara menjadi konflik agama. Dari hasil penelitian Ucu Martanto dapat dilihat bahwa ruang sangat berpengaruh dalam dinamika dan perubahan sosial di enam desa. Serangkaian proses tawar menawar dan kontestasi ruang kerap kali terjadi dalam kehidupan sehari-hari di enam desa Halmahera Utara melalui agensi-agensi yang berkepentingan terhadap pemaknaan ruang sosial di desa-desa tersebut.

### **2.3.5 Kajian Ruang Liminal pada Konsep Teritori Pemukiman Adat Sunda Cigugur Melalui Analisis Ritual “Ngajayak”**

Penelitian ini dilakukan oleh Yunita Dwi Adisaputri dan Indah Widiastuti dan diterbitkan oleh Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia pada tahun 2014. Prosiding ini membahas tentang teritori pemukiman adat masyarakat Adat Karuhun Urang Cigugur (AKUR) dengan cara menelusuri ritual adatnya khususnya dalam prosesi *Ngajayak* di Upacara *Seren Taun* masyarakat AKUR Cigugur.

Upacara *Seren Taun* merupakan sebuah ritual syukuran panen dari masyarakat agraris Sunda yang dilakukan setiap sehabis panen. Sedangkan *Ngajayak* adalah serangkaian prosesi bibit padi dan hasil bumi dari kampung-kampung yang berada dalam kampung adat Cigugur menuju ke kawasan inti yaitu Paseban Panca Tri Tunggal. Dalam mengukur batasan wilayah kampung adat Yunita Dwi A dan Indah Widiastuti memilih prosesi *Ngajayak* karena ritual ini paling representatif untuk membaca kehadiran dan batasan teritori wilayah kampung adat AKUR. Penelitian yang dilakukan Yunita dan Indah ini menggunakan metode kualitatif dengan metode etnografi untuk memperoleh data yang lengkap tentang masyarakat yang berkait dengan penyelenggaraan ritual *Ngajayak* dalam Upacara *Seren Taun*.

Dari hasil penelitian Yunita dan Indah prosesi *Ngajayak* bukan hanya sebatas prosesi upacara adat, melainkan ritual ini dapat digunakan untuk merekonstruksi ruang yang merupakan wilayah kesatuan adat. Dalam penelitian ini Yunita dan Indah melihat adanya transformasi wilayah Upacara *Seren Taun* dari era Pangeran Madrais, Pangeran Tedjabuana, dan Pangeran Djati Kusumah tepatnya dari tahun 1920 hingga tahun 2014. Maka dari itu dan Indah melihat ruang liminal tidak lah rigid terlihat secara fisik, melainkan lebih bersifat fleksibel. Teritori-teritori wilayah adat Cigugur ini bisa saja mengalami transformasi lagi sesuai dinamika masyarakatnya. Ruang-ruang liminal yang ada dapat ternegosiasikan akibat dorongan kebutuhan fungsi dan keterbatasan sumber daya.

### **2.3.6 Literature Review**

Pada subbab ini peneliti akan mengelaborasi dan mengkomparasikan penelitian-penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan sebelumnya dengan penelitian “Produksi Ruang Adat *Ulayat* : Studi Kasus Sengketa Perebutan Tanah *Ulayat* di Blok Mayasih dan Kecamatan Cigugur” agar dapat melihat kekosongan akademik yang ada dari penelitian yang sudah ada. Lima penelitian yang peneliti jadikan penelitian terdahulu memiliki dua variabel yang sama dengan penelitian ini yaitu: ruang dan masyarakat adat. Namun dari kelima penelitian yang telah dilakukan, peneliti melihat kelima penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini.

Pada penelitian Wahyudi Arimbawa dan I Komang Gede Santhyasa yang berjudul “Perspektif Ruang Sebagai Entitas Budaya Lokal (Orientasi Simbolik Ruang Masyarakat Tradisional Desa Adat Panglipuran, Bangli – Bali)”, memang mengkaji penataan ruang berdasarkan perspektif kebudayaan lokal masyarakat adat. Konsep sumbu bumi dan sumbu religi yang diamini masyarakat adat desa Panglipuran lantas dikonsepskan untuk menata ruang-ruang di desa tersebut. Namun, seperti yang telah peneliti paparkan sebelumnya dalam penelitian Wahyudi Arimbawa dan I Komang Gede Santhyasa lebih membahas kajian ini dari sudut pandang arsitektur lingkungan, sehingga penelitian ini terbatas pada proses penataan dan nilai yang mempengaruhi penataan ruang tanpa melihat ruang ini sebagai sebuah produk politik yang didalamnya terdapat pelbagai kepentingan.

Berikutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Syahriana Syam dan Syahrianti S dengan judul “Proses Perubahan Ruang Akibat Konflik (Studi Kasus :

Kawasan Kampung Bajo Sulawesi Selatan)” membahas tentang proses perubahan penataan ruang yang terjadi di Kampung Adat Bajo, Sulawesi Selatan. Penelitian ini berfokus pada perubahan penataan ruang yang disebabkan karena adanya intervensi pemerintah dan konflik kepentingan dengan menggunakan teori yang sama yaitu teori produksi ruang Lefebvre. Namun penelitian Syahriana Syam dan Syahrianti memiliki perbedaan fokus masalah dengan “Produksi Ruang Adat *Ulayat* : Studi Kasus Sengketa Perebutan Tanah *Ulayat* di Blok Mayasih, Kecamatan Cigugur” ini, dimana dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan adalah produksi ruang yang dilakukan oleh kedua pihak. Adanya perbedaan cara pandang yang terjadi antara Djaka Rumantaka dan masyarakat adat menyebabkan terjadinya sebuah persengketaan.

Penelitian selanjutnya yang menjadi rujukan penelitian terdahulu adalah disertasi Simon Abdi Kari Frank “Membayangkan Adat : Suatu Tentang Kajian Tanah Adat, Sengketa dan Penyelesaian di Kotamadya dan Kabupaten Jayapura, Provinsi Jayapura.” Disertasi Simon Abdi Frank dengan penelitian peneliti memiliki obyek yang sama yaitu masyarakat adat dan persengketaan tanah *ulayat*. Namun dalam penelitian Simon lebih berfokus kepada aspek antropologis hukum dan penyelesaian sengketa tanah, sedangkan peneliti akan lebih berfokus terhadap produksi ruang oleh masyarakat adat dengan kajian politik ruang. Teori yang digunakan juga berbeda, Simon Abdi Frank menggunakan teori pluralisme hukum, sedangkan peneliti menggunakan teori produksi ruang.

Penelitian Ruang dan Konflik Wilayah: Cerita dari Enam Desa yang dilakukan oleh Ucu Martanto menggunakan teori yang sama dengan penelitian

produksi ruang adat *ulayat* ini yaitu dengan menggunakan teori produksi ruang Lefebvre. Penelitian ini juga menganalisis bahwa ruang adalah produk politik dan memiliki peran vital dalam perubahan sosial. Hasil penelitian Ucu Martanto melihat adanya perbedaan cara pandang dan pemaknaan terhadap sebuah tanah menyebabkan terjadinya konflik yang berkepanjangan. Hal ini juga akan ditemukan dalam penelitian “Produksi Ruang Adat *Ulayat*: Studi Kasus Sengketa Perebutan Tanah di Blok Mayasih dan Kecamatan Cigugur”.

Faktor pembeda dari penelitian Ucu Martanto dan penelitian peneliti adalah obyek dan konflik yang terjadi. Ucu Martanto meneliti di enam desa Halmahera Utara yaitu : Dum Dum, Akesahu, Akelamo Kao, Tetewang, Bobane Igo, dan Pasir Putih, sedangkan obyek tanah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Blok Mayasih Kecamatan Cigugur, Jawa Barat. Konflik sengketa perebutan tanah yang terjadi juga berbeda, dalam penelitian Ucu Martanto konflik disebabkan karena adanya arus transmigrasi dan perbedaan cara pandang antara pemerintah dan masyarakat lokal terhadap suatu wilayah yang menyebabkan pemerintah membuat ruang-ruang imaji baru dengan praktik politik seperti pembuatan sistem administrasi kependudukan, regulasi, dan institusi sosial. Sedangkan dalam penelitian produksi ruang adat *ulayat* ini konflik yang terjadi adalah antara keturunan tokoh adat dan masyarakat adat yang memiliki cara pandang ruang yang berbeda, tanah yang selama ini dipahami sebagai tanah adat oleh masyarakat AKUR Cigugur, dikonstruksi oleh Djaka Rumantaka menjadi sebuah tanah waris dengan bukti kepemilikan administratif dan tuntutan ke Pengadilan Negeri Kuningan.

Penelitian terakhir yang menjadi perbandingan penelitian terdahulu peneliti adalah “Kajian Ruang Liminal pada Konsep Teritori Pemukiman Adat Sunda Cigugur Melalui Analisis Ritual *Ngajayak*” yang dilakukan oleh Yunita Dwi Adisaputri dan Indah Widiastuti. Penelitian ini memiliki lokasi yang sama dengan penelitian peneliti yaitu kampung masyarakat adat AKUR. Namun penelitian peneliti lebih terfokus kepada sengketa perebutan ruang di Blok Mayasih, Cigugur. Selain itu penelitian Yunita dan Indah lebih terfokus kepada batasan wilayah atau ruang desa AKUR berdasarkan prosesi *Ngajayak* Upacara *Seren Taun* dengan kajian kebudayaan, sedangkan penelitian peneliti lebih membahas produksi ruang adat *ulayat* yang berujung pada sengketa perebutan tanah di Blok Mayasih, Kecamatan Cigugur, Kuningan, Jawa Barat.

Dari pemaparan diatas dapat kita lihat persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Berdasarkan penjabaran diatas belum ada penelitian yang mengkaji politik ruang khususnya dalam kasus sengketa tanah *ulayat* di Blok Mayasih, Kecamatan Cigugur. Maka dari itu penelitian ini akan memberikan sumbangsih baru dalam kajian ilmu politik khususnya politik ruang dari perspektif masyarakat adat.

**Tabel 2.1 Matriks Perbandingan Penelitian**

| Peneliti                                     | Judul Penelitian   | Jenis Penelitian     | Perbedaan Penelitian                               | Hasil Penelitian  |
|--|--|----------------------|--|---|
| Wahyudi Arimbawa dan I Komang Gede Santhyasa | Perspektif Ruang Sebagai Entitas Budaya Lokal (Orientasi Simbolik Ruang Masyarakat Tradisional | Jurnal Ilmiah (2010) | - Teori Ruang Amos Rapoport<br>- Pembahasan kajian | Perwujudan pola dan struktur ruang di Desa Adat Panglipuran Bali dilatarbelakangi oleh pengaruh agama Hindu dengan berlandaskan pada tiga |

|                                 |  |                                |  |   |
|---------------------------------|--|--------------------------------|--|---|
|                                 | Desa Adat Panglipuran, Bangli – Bali)  |                                | arsitektur lingkungan<br>- Ruang tidak dimaknai sebagai entitas politik<br>- Obyek Penelitian  | kerangka dasar yaitu Tattwa (Filosofis), Tata susila (etika), dan upacara (ritual).   |
| Syahriana Syam dan Syahrianti S | Proses Perubahan Ruang Akibat Konflik (Studi Kasus : Kawasan Kampung Bajo Sulawesi Selatan)  | Prosiding Temuan Ilmiah (2015) | - Fokus Penelitian proses perubahan ruang, bukan produksi ruang adat<br>- Obyek Penelitian   | Proses perubahan ruang yang terjadi di Kampung Bajo, Sulawesi Selatan disebabkan oleh pelbagai faktor yaitu : adanya pengaruh budaya lain ,pertambahan penghuni, konflik kepentingan dan intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) |
| Simon Abdi Kari Frank           | Membayangkan Adat : Suatu Kajian Tentang Tanah Adat, Sengketa dan Penyelesaian di Kotamadya dan Kabupaten Jayapura, Provinsi Jayapura. | Disertasi (2009)               | - Penelitian lebih membahas perbedaan konstruksi ruang dari sudut pandang antropologi s hukum.<br>- Teori Pluralisme Hukum<br>- Obyek Penelitian | Dalam penyelesaian sengketa tanah di Jayapura sering kali megabaikan aspek-aspek sosial budaya, sehingga persengketaan akan terus terjadi meskipun telah diputuskan, diperlukan kajian pluralisme hukum.  |
| Ucu Martanto                    | Ruang dan Konflik  | Monograf (2012)                | - Konflik masyarakat   | Ruang sangat berpengaruh dalam  |

|  |  |                                |   |  |
|--|--|--------------------------------|---|--|
|  | Wilayah: Cerita dari Enam Desa   |                                | adat dengan Pemerintah, bukan antara masyarakat adat dengan keturunan masyarakat adat.<br><br>- Obyek Penelitian    | dinamika dan perubahan sosial di enam desa. Serangkaian proses tawar menawar dan kontestasi ruang kerap kali terjadi dalam kehidupan sehari-hari di enam desa Halmahera Utara melalui agensi-agensi yang berkepentingan terhadap pemaknaan ruang sosial di desa-desa tersebut.   |
| Yunita Dwi Adisaputri dan Indah Widiastuti | Kajian Ruang Liminal pada Konsep Teritori Pemukiman Adat Sunda Cigugur Melalui Analisis Ritual <i>Ngajayak</i> | Prosiding Temuan Ilmiah (2014) | - Fokus penelitian membahas ruang masyarakat adat berdasarkan upacara adat, tidak membahas sengketa di Blok Mayasih | Ruang liminal masyarakat AKUR Cigugur tidak lah rigid terlihat secara fisik, melainkan lebih bersifat fleksibel. Teritori-teritori wilayah adat Cigugur ini bisa saja mengalami transformasi lagi sesuai dinamika masyarakatnya. Ruang-ruang liminal yang ada dapat ternegosiasikan akibat dorongan kebutuhan masyarakat |

Sumber: Diolah Peneliti, 2017

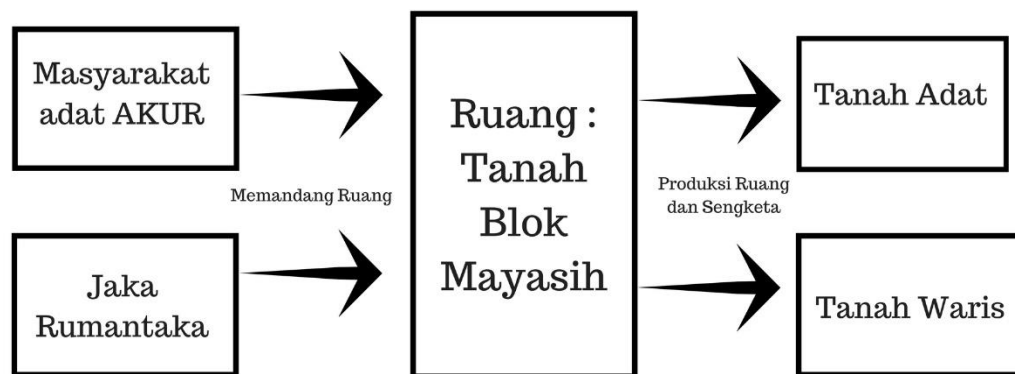
## 2.4 Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan penelitian terkait dengan Produksi Ruang Adat *Ulayat* : Studi Kasus Sengketa Perebutan Tanah *Ulayat* Blok Mayasih Kecamatan Cigugur, peneliti mencoba membuat kerangka konsep pemikiran yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian dan juga menyusun laporan hasil



penelitian. Tujuan penyusunan kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah untuk memfokuskan penelitian ke dalam objek kajian yang diteliti, sehingga bahasannya tidak melebar dan menyebabkan penelitian tidak sesuai dengan kerangka awal penelitian. Berikut ini adalah kerangka pemikiran penelitian ini :

**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran**



Sumber: Diolah Peneliti, 2017

Dari kerangka pemikiran diatas dapat dilihat Djaka Rumantaka dan masyarakat adat AKUR sama-sama memiliki cara pandang yang berbeda terhadap tanah di Blok Mayasih. Masyarakat AKUR memaknai tanah di Blok Mayasih sebagai tanah adat sedangkan bagi Djaka Rumantaka tanah tersebut adalah tanah waris. Adanya perbedaan cara pandang tersebut menyebabkan terjadinya sengketa tanah di Blok Mayasih. Persengketaan tanah yang terjadi merupakan sebuah perebutan produk politik.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dan mengeksplorasi pengalaman subjektif individu dan makna yang mereka hubungkan dengan pengalaman-pengalaman yang terjadi.<sup>35</sup> Penelitian ini menghasilkan data deskriptif yang berasal dari perspektif obyek yang diteliti guna memahami makna dan intepretasi yang mereka berikan pada suatu isu, peristiwa, maupun obyek. Menurut David Marsh dan Gerry Stoker metode kualitatif tepat untuk menelisik suatu pemikiran atau narasi yang dikonstruksi oleh masyarakat.<sup>36</sup> Alasan peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian “Produksi Ruang Adat *Ulayat*: Studi Kasus Sengketa Perebutan Tanah *Ulayat* di Blok Mayasih Kecamatan Cigugur” adalah untuk memperoleh pemahaman yang holistik dan dapat menjelaskan permasalahan ini secara mendalam.

Lebih lanjut dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis memandang ilmu sosial sebagai sebuah analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung terhadap pelaku sosial dalam *setting* yang alamiah untuk memahami dan menafsirkan bagaimana

---

<sup>35</sup> David Marsh dan Gerry Stoker. 2011. *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media, hlm. 242

<sup>36</sup> *Ibid.*,

para pelaku sosial itu dapat menciptakan dan memelihara dunia sosial mereka.<sup>37</sup> Peneliti dalam hal ini menggunakan paradigma konstruktivis guna memahami konstruksi yang terbangun oleh masyarakat adat AKUR dan Djaka Rumantaka dalam memandang tanah di Blok Mayasih, Kecamatan Cigugur.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penelitian ini ditujukan agar penelitian lebih terfokus dan tidak melebar dari rumusan masalah yang telah ditentukan. Menurut Emy Susanti Hendrarso fokus penelitian dalam penelitian kualitatif berguna dalam memberikan arah selama proses penelitian, terutama pada saat pengumpulan data, yaitu untuk membedakan antara data mana yang relevan dengan tujuan penelitian.<sup>38</sup>

Maka dari itu dalam penelitian “Produksi Ruang Adat *Ulayat* : Studi Kasus Sengketa Perebutan Tanah *Ulayat* di Blok Mayasih Kecamatan Cigugur” memiliki fokus penelitian yaitu produksi ruang yang dilakukan masyarakat adat AKUR Cigugur dan Djaka Rumantaka pada tanah *ulayat* di Blok Mayasih, Kecamatan Cigugur. Penelitian ini berfokus kepada bagaimana masyarakat AKUR Cigugur dan Djaka Rumantaka dalam memproduksi ruang di Blok Mayasih, Kecamatan Cigugur.

---

<sup>37</sup> Dedy Nur Hidayat. 2003. *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*. Jakarta :FISIP Universitas Indonesia, hlm.3

<sup>38</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Prenadamedia, hlm. 171

**Tabel 3.1 Matriks Fokus Penelitian**

| Permasalahan   | Fokus   | Indikator  | Metodologi           |
|--|---|--|----------------------|
| Perbedaan cara pandang akan sebuah tanah di Blok Mayasih antara masyarakat adat AKUR dengan Djaka Rumantaka menyebabkan persengketaan tanah, | Produksi tanah <i>ulayat</i> di Blok Mayasih dan oleh masyarakat AKUR.<br><br>Perbedaan produksi antara Djaka Rumantaka dan masyarakat adat AKUR. | - <i>Perceived Space</i><br>- <i>Conceived Space</i><br>- <i>Lived Space</i> | Observasi, wawancara |

Sumber : Diolah Peneliti, 2017.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Berdasarkan judul dan fokus penelitian yang peneliti ambil yaitu Produksi Ruang Adat *Ulayat*: Studi Kasus Sengketa Perebutan Tanah *Ulayat* di Blok Mayasih, Kecamatan Cigugur, maka penelitian ini dilakukan di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Cigugur merupakan kampung masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) sekaligus tempat terjadinya sengketa perebutan tanah yang menjadi fokus penelitian ini.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Berikut ini adalah metode pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam penelitian kali ini :

#### *1. In-depth Interview*

*In-depth interview* atau wawancara mendalam merupakan salah satu teknik pengumpulan data dari penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara melakukan percakapan atau wawancara secara intensif dengan informan

yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan *in-depth interview* ke beberapa informan yaitu: Ibu Dewi Kanti selaku Girang Pangaping (Sepuh Adat), Bapak Okky Satrio selaku Girang Pangaping, Ibu Kristina Mimin Saminah selaku istri alm. E.Kusnadi yang menempati rumah sengketa, Ira Indrawardana anak dari Kristina Mimin Saminah yang menempati rumah sengketa, Djaka Rumataka sebagai penggugat, Pak Nono Darsono sebagai Lurah Cigugur, Ibu Ratu Amy anak dari Pangeran Djatikusumah yang dapat mengetahui isi manuskrip, dan masyarakat adat AKUR Cigugur. *In-depth interview* dilakukan saat penelitian untuk mengetahui cara pandang masyarakat dan produksi ruang dalam kasus sengketa perebutan tanah *ulayat* ini. Dari hasil *in-depth interview* peneliti menemukan perbedaan cerita dan informasi yang cukup signifikan antara pihak masyarakat adat AKUR dan Djaka Rumantaka, perbedaan tersebut mencakup sejarah masyarakat adat, keberadaan masyarakat adat, cara pandang terhadap tanah sengketa dan sejarah pembangunan rumah sengketa.

## 2. Observasi

Metode observasi ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lapangan. Observasi ini dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman terkait kondisi lapangan dan mengungkapkan keadaan yang dijelaskan sesuai dengan data yang diberikan oleh informan. Metode observasi ini peneliti lakukan demi mendapatkan pemaknaan yang holistik tentang produksi ruang adat *ulayat* yang dilakukan oleh masyarakat adat

AKUR dan Djaka Rumantaka. Observasi yang peneliti lakukan selama proses penelitian adalah mengunjungi dan tinggal di rumah sengketa, berkunjung ke Paseban Tri Panca Tunggal sebagai pusat kegiatan masyarakat adat dan mengikuti kegiatan-kegiatan masyarakat adat baik yang bersifat formal maupun informal. Dari hasil observasi peneliti melihat bahwa tanah yang menjadi sengketa antara masyarakat AKUR dan Djaka Rumantaka adalah rumah yang ditinggali oleh keluarga alm. E.Kusnadi. Alm. E.Kusnadi membuat rumah yang dia tinggali dengan pelbagai ornament, relief yang mengacu kepada kekhasan Cigugur dan konektivitas dengan Paseban dan rumah tersebut digunakan sebagai rumah penginapan bagi tamu Paseban saat ada kegiatan masyarakat adat dan tempat penyimpanan barang pusaka.

### 3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan untuk mendapat informasi dari pelbagai literasi seperti buku-buku, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, disertasi, peratutan-peraturan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang dapat mendukung penelitian ini. Studi kepustakaan dilakukan oleh peneliti untuk mengidentifikasi sejarah masyarakat AKUR dan permasalahan tanah *ulayat* yang telah ditulis oleh penulis lain sebelumnya guna memverifikasi hasil wawancara dan mempertajam hasil analisis.

### 4. Studi Dokumen

Studi dokumen ini ditujukan untuk melakukan penelusuran dan identifikasi demi melengkapi dan mempertajam data hasil observasi dan wawancara

yang peneliti dapatkan dari informan. Studi dokumen ini meliputi arsip persidangan, keterangan kepemilikan tanah, manuskrip dan arsip lainnya yang dapat menunjang penelitian ini. Dari hasil studi dokumen masyarakat AKUR Cigugur memiliki beberapa dokumen sebagai bukti yakni kikitir atas nama Pangeran Alibassa (Madrais), surat pajak dan bumi atas nama Pangeran Tedja Buana dan manuskrip yang mengatakan bahwa tanah adat tidak boleh diwariskan, diperjual-belikan, maupun dipindah tangankan. Sedangkan Djaka Rumantaka memiliki bukti keterangan surat waris kesaksian Murkanda --seorang juru tulis-- yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Utari dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang beratasnamakan Djaka Rumantaka semenjak tahun 2009.

### **3.5 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Berikut ini penjabaran sumber data yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini:

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung --tidak melalui media perantara-- dari hasil wawancara dengan narasumber.<sup>39</sup> Data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi hasil observasi, opini narasumber, dan kejadian atau kegiatan yang terjadi di lapangan. Hasil observasi peneliti dapatkan dengan cara tinggal di kampung adat

---

<sup>39</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publications, hlm. 13

masyarakat AKUR Cigugur, bermalam di rumah sengketa dan mengikuti acara-acara adat. Opini narasumber dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung sesuai dengan narasumber yang telah peneliti tentukan sebelumnya.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari sebuah penelitian yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bukti persidangan, pemberitaan media yang terkait dengan sengketa tanah Cigugur dan hasil penelitian yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dari pelbagai pihak untuk mendukung sebuah penelitian.

### 3.6 Metode Pemilihan Informan

Metode pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive*. Pemilihan informan dalam teknik *purposive* didasari oleh karakteristik informan yang memiliki pemahaman mendalam ataupun terlibat dalam permasalahan yang sedang diteliti sehingga mendapatkan data yang didapatkan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan menggunakan teknik *purposive* diharapkan informan yang telah dipilih benar-benar mengetahui informasi sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Informan penelitian dalam suatu penelitian terdiri dari:<sup>40</sup>

#### 1. Informan Kunci (*key informan*)

---

<sup>40</sup> Bagong Suyanto. *Op.cit*, hlm.172



Informan yang mengetahui dan memiliki pelbagai informasi pokok yang dibutuhkan dalam suatu penelitian.

## 2. Informan Utama

Informan yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

## 3. Informan Tambahan

Informan yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan ketiga jenis informan yang telah dipaparkan diatas yaitu : informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Berikut ini adalah tabel daftar informan beserta kriteria dan klasifikasi jenis informan :

**Tabel 3.1 Daftar Informan**

| No | Nama                   | Kriteria   | Jenis Informan |
|----|------------------------|--|----------------|
| 1  | Dewi Kanti             | Selaku <i>Girang Pangaping</i> AKUR dan merupakan keturunan dari Pangeran Madrais.                           | Informan Kunci |
| 2  | Djaka Rumantaka        | Pihak yang memiliki pemaknaan berbeda dari masyarakat adat dan selaku pihak penuntut akan tanah Blok Mayasih | Informan Kunci |
| 3  | Okky Satrio            | Selaku <i>Girang Pangaping</i> AKUR  | Informan Kunci |
| 4  | Kristina Mimin Saminah | Selaku istri dari alm. E.Kusnadi yang menempati rumah sengketa   | Informan Kunci |
| 5  | Ira Indrawardana       | Selaku anak dari alm. E.Kusnadi yang menempati rumah sengketa  | Informan Kunci |
| 6  | Abah Rohaman           | Masyarakat adat kelahiran tahun 1931 yang menjadi saksi sejarah dari Pangeran                                | Informan Utama |

|    |                                       |  |                   |
|----|---------------------------------------|--|-------------------|
|    |                                       | Madrais dan mengetahui tanah tersebut  |                   |
| 7  | Abah Jumali                           | Masyarakat adat kelahiran tahun 1950 dan mengetahui tanah tersebut                                       | Informan Utama    |
| 8  | Abah Badra                            | Masyarakat adat yang mengetahui tanah tersebut   | Informan Utama    |
| 9  | Pak Subrata                           | Masyarakat adat kelahiran 1942 yang mengetahui tanah tersebut  | Informan Utama    |
| 10 | Ratu Emy                              | Masyarakat adat dan keturunan dari Pemimpin adat yang dapat membaca manuskrip                            | Informan Utama    |
| 11 | Masyarakat adat AKUR                  | Sebagai masyarakat adat tentunya mempunyai cara pandang tersendiri terhadap sebuah tanah <i>ulayat</i> . | Informan Utama    |
| 12 | Lurah Cigugur                         | Sebagai Lurah Kelurahan Cigugur dapat memberikan keterangan mengenai konflik                             | Informan Tambahan |
| 13 | Dr. Widyo Nugrahanto                  | Ahli sejarah Universitas Padjajaran dan saksi ahli   | Informan Tambahan |
| 14 | Professor. Dr. Sulistyowati Indrawati | Ahli antropologi hukum Universitas Indonesia dan saksi ahli masyarakat adat                              | Informan Tambahan |
| 15 | Antonius Cahyadi S.H, LL.M            | Tim Kuasa Hukum Masyarakat AKUR  | Informan Tambahan |

Sumber: Diolah Peneliti, 2017

### 3.7 Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif dibutuhkan analisa data demi mendapatkan sebuah makna yang terkandung pada informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep analisis data yang diutarakan oleh Miles dan Huberman:<sup>41</sup>

#### 1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

<sup>41</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Op.cit* , hlm. 31

Kondesasi data adalah serangkaian proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstrak, dan menstransformasikan data yang telah didapatkan dari catatan lapangan tertulis, wawancara transkrip, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Kondesasi data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah memilih fokus dari data yang banyak ditemukan di lapangan menjadi data-data yang sesuai dengan fokus yakni Produksi Ruang Adat *Ulayat*: Studi Kasus Sengketa Perebutan Tanah *Ulayat* di Blok Mayasih Kecamatan Cigugur. Hal ini ditujukan agar penelitian tidak melebar dari fokus permasalahan.

## 2. Penyajian Data (*Display Data*)

Langkah berikutnya untuk menganalisis data dari penelitian kualitatif adalah penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dengan pelbagai cara mulai dari bagan, uraian singkat, hubungan antar kategori, dan lainnya, namun yang paling banyak digunakan biasanya adalah teks yang bersifat naratif. Penyajian data yang dilakukan peneliti adalah menyajikan data-data transkrip wawancara menjadi naratif, membuat bagan silsilah keluarga untuk mengetahui hubungan antara Djaka Rumantaka dengan Paseban dan menguraikan catatan hasil observasi lapangan.

## 3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Verifikasi data ditujukan untuk melakukan tinjauan ulang data-data yang diperoleh dari hasil lapangan, sehingga dalam penarikan kesimpulan sebuah penelitian kualitatif tidak menyimpang dari alur penelitian.

### **3.8 Metode Keabsahan Data**

Metode keabsahan data bertujuan untuk menghasilkan sebuah penelitian yang lebih akurat. Berikut ini adalah beberapa cara keabsahan data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini :

#### **1. Memperpanjang Penelitian**

Memperpanjang waktu penelitian ditujukan untuk menyempurnakan data agar lebih akurat dengan cara melakukan wawancara yang mendalam dan menambah waktu observasi. Dalam hal ini peneliti menambah waktu penelitian di Cigugur sampai terselenggarakannya “Festival Manuskrip dan Seni Budaya Masyarakat AKUR” dalam rangka memperingati 185 tahun Pangeran Sadewa Madrais Alibassa Kusuma Wijaya Ningrat. Dengan menambah waktu penelitian di Kampung Adat Cigugur peneliti jadi dapat mengetahui sejarah Pangeran Madrais dan AKUR secara lebih jelas dan dapat melakukan observasi lebih lama di rumah yang menjadi sengketa.

#### **2. Triangulasi Data**

Triangulasi data bertujuan untuk memverifikasi kebenaran data dengan cara mengkomparasikan hasil observasi dan wawancara dengan data-data yang diperoleh dari sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Triangulasi dalam penelitian ini meliputi tiga jenis yaitu: triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber peneliti lakukan dengan cara mewawancarai pihak masyarakat adat lainnya yang tidak ikut dalam konflik ini dengan menanyakan tentang pandangan mereka terhadap ruang yang telah ada, sejarah ruang dan sejarah masyarakat adat.

Selanjutnya triangulasi sumber yang peneliti lakukan terhadap Djaka Rumantaka adalah dengan melakukan pengecekan data dengan yang telah dia sampaikan di transkrip persidangan. Triangulasi data peneliti lakukan dengan cara melakukan observasi, hasil yang didapatkan bukan hanya berasal dari wawancara, peneliti juga melakukan observasi dengan cara berkunjung langsung ke rumah yang menjadi sengketa dan bermalam disana. Triangulasi waktu peneliti melakukannya dengan mewawancarai kembali informan kunci di waktu yang berbeda agar dapat memberikan data yang lebih optimal.

### 3. Berdiskusi Dengan Ahli

Berdiskusi dengan ahli yang memiliki pemahaman lebih mendalam terkait tema penelitian ini. Peneliti selain melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang bersengketa, peneliti juga melakukan diskusi dengan beberapa ahli agar mengetahui bagaimana pandangan mereka terhadap kasus ini dan bisa menjadi bahan masukan untuk peneliti. Peneliti melakukan diskusi dengan beberapa narasumber diantaranya adalah Pak Antonius Cahyadi, S.H, L.LM dosen Universitas Indonesia dan kuasa hukum masyarakat AKUR, Ibu Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H. M.Si selaku ahli antropologi hukum Universitas Indonesia dan Professor. Dr. Sulistyowati Indrawati selaku ahli antropologi Universitas Indonesia. Selain para ahli tersebut peneliti dalam hal ini juga melakukan diskusi dengan dosen-dosen di Program Studi Ilmu Politik Universitas Brawijaya.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **4.1 Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Cigugur**

Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) merupakan sekelompok masyarakat adat yang masih menjaga nilai-nilai lokal dan adat Sunda sesuai dengan ajaran leluhurnya. Masyarakat adat AKUR ini berpusat pada di Paseban Tri Panca Tunggal, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Masyarakat AKUR dahulu lebih dikenal dengan Agama Djawa Sunda (ADS)<sup>42</sup> didirikan oleh Pangeran Sadewa Alibasa Kusuma Wijaya Ningrat atau yang biasa dikenal dengan Pangeran Madrais, Kyai Madrais atau Rama Madrais. Pangeran Madrais dilahirkan pada tanggal 9 Mulud 1765 (1833 Masehi) di Susukan Ciawigebang.<sup>43</sup> Beliau merupakan keturunan Pangeran Gebang dari Pangeran Alibassa dan R. Kastewi yang berasal dari keturunan Tumenggung Jayadipura.

Saat berusia 10 tahun Pangeran Madrais bekerja pada Kuwu Sagarahiang sebagai penggembala kerbau dan dikenal sebagai Taswan.<sup>44</sup> Namun sebelum beliau meninggalkan pekerjaannya dia mengaku bahwa nama yang sebenarnya adalah Madrais –singkatan dari Muhammad Rais--. Setelah itu ia berkelana pergi

---

<sup>42</sup> Berdasarkan keterangan Okky Satrio (2017) Agama Djawa Sunda (ADS) merupakan sebutan yang dibuat oleh pihak luar untuk para pengikut Madrais. ADS yang diamini oleh masyarakat adat adalah singkatan dari “Anjawat Lan Anjawab Roh Susun-susun Kang Den Tunda” yang berarti memilih dan menyaring getaran yang ada di alam semesta yang senantiasa berinteraksi dengan kehidupan manusia.

<sup>43</sup> R. Emmy Ratna Gumilang, R. Dewi Kanti Setianingsih, Ira Indrawardana, Euis Kurniasih. 2016. *Gambaran Umum Naskah Koleksi Paseban Tri Panca Tunggal, Cigugur – Kuningan*. Jakarta : Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jurnal Manassa Manuskripta Vol.6, No.2, 2016

<sup>44</sup> Nuhrison M. Nuh, *op.cit*

mengembara ke pelbagai *paguron* atau pesantren yang ada di Jawa Barat hingga akhirnya dia memutuskan untuk menetap dan mendirikan Paseban di Cigugur.

Pengembaraan Madrais ke pelbagai *paguron* merupakan babak penting dalam sejarah ADS, karena dari pengembaraan tersebut pokok-pokok ajaran ADS lahir.<sup>45</sup> Sebagai seorang tokoh masyarakat dan pemrakarsa Tri Panca Tunggal ia memiliki pengaruh yang cukup kuat di masyarakat bukan hanya soal kepercayaan tapi juga pelbagai aspek kehidupan hingga dapat merangkul keberagaman agama yang ada di masyarakat. Dalam perjalanan sejarahnya ajaran Madrais sempat dinyatakan sesat karena selain mengajarkan agama Islam, diajarkan pula agama lain hingga mencapai titik temu kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>46</sup> Ajaran Madrais ini pula mengajarkan jati diri dan budaya khas masyarakat Sunda. Meskipun pelbagai *labelling* yang diterima oleh kelompok ajaran Madrais, tetap banyak masyarakat yang ingin belajar dan mengikuti ajaran Madrais yang akhirnya terbentuklah sebuah kelompok masyarakat adat Cigugur.

Selama masa kolonial Belanda, Pangeran Madrais dan ADS-nya dianggap sebagai kelompok radikal dan membahayakan. Gerakan budaya dan spiritual yang dikobarkan oleh Pangeran Madrais semakin lama semakin besar. Melihat bahayanya gerakan budaya spiritual tersebut, Pangeran Madrais dituduh melakukan pemerasan dan penipuan terhadap rakyat sehingga beliau diasingkan ke

---

<sup>45</sup> Jojor Yuni Artha Siahaan. 2017. *Analisis Sosio-Yuridis Atas Hak Kebebasan Beragama Dan Berkepercayaan Masyarakat Sunda Wiwitan (Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Hal Pemenuhan Hak-Hak Sipil)*. Jakarta: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

<sup>46</sup> Holillah Mina, *op.cit.*

Merauke selama tahun 1901-1908.<sup>47</sup> Namun, selama di pengasingan Merauke beliau tidak berhenti menuliskan tuntunan.

Setelah kembali dari pengasingan pada tahun 1908, Paseban Tri Panca Tunggal semakin ketat diawasi oleh pihak kolonial bahkan para pengikutnya dilarang untuk menemui Pangeran Madrais. Hal ini akhirnya membuat Pangeran Madrais memutuskan untuk melanjutkan kegiatannya dengan melakukan usaha pertanian di Cigugur. Melalui kegiatan tersebut Pangeran Madrais dapat melakukan interaksi dengan masyarakatnya.

Pada tahun 1920, Pangeran Madrais diberikan usulan untuk menulis buku oleh seorang penasihat Belanda yang bernama Jacob tentang tuntunan yang beliau ajarkan dan agar dapat dibaca oleh banyak orang. Buku yang ditulis oleh Pangeran Madrais ini dikenal dengan *Statiten*.<sup>48</sup> Pangeran Madrais aktif menulis hingga akhir hayatnya pada tahun 1939, tulisan-tulisan ini lantas diturunkan untuk generasi berikutnya sebagai panduan kehidupan dan bermasyarakat.

Sepeninggalan Pangeran Madrais bimbingan masyarakat adat pengikutnya dilanjutkan oleh Pangeran Tedja Buana Alibasa yang biasa dikenal dengan *Rama Pangwedat* atau Rama Penerus. Pada tahun 1964 di saat menjelang peristiwa G-30-S para pengikut Pangeran Tedja Buana ini dilarang untuk memeluk agama ADS oleh PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) di bawah Kejaksaan Negeri setempat karena ajaran ini dianggap menyimpang dan tidak dikategorikan sebagai agama resmi. Pembubaran agama ini diputuskan melalui pengeluaran surat

---

<sup>47</sup> R. Emmy Ratna Gumilang, dkk, *op.cit*

<sup>48</sup> *Ibid.*,



SK No 001/KPTS/DK 1964 tanggal 12 Februari 1964.<sup>49</sup> Kondisi sosial dan politik yang tidak memungkinkan membuat Pangeran Tedjabuana diatas kertas menyatakan bahwa agama ADS dibubarkan dan para pengikutnya diberikan kebebasan untuk memilih agama yang mereka yakini.

Pangeran Tedjabuana beserta anak sekaligus calon penerusnya Pangeran Djatikusumah memilih untuk memeluk agama Katolik. Setelah 17 tahun memeluk agama Katolik (1964-1981), Pangeran Djatikusumah memutuskan untuk keluar dari agama tersebut dan mendirikan Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU) yang diikuti oleh 1.600 orang pengikutnya.<sup>50</sup> PACKU merupakan lembaga formal bagi para penghayat Sunda Wiwitan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Bina Hayat dengan nomor 192/R.3/N.1/1982 dengan wilayah organisasi Jawa Barat dan sekitarnya.<sup>51</sup>

Keluarnya Pangeran Djatikusumah yang kembali memeluk agama ADS atau yang sekarang dikenal dengan Sunda Wiwitan membuat kekhawatiran dari Gereja Katolik. Pihak pastor meminta bantuan kepada Pangeran Djatikusumah agar para pengikutnya yang sudah memeluk agama tidak kembali ke Sunda Wiwitan. Pangeran Djatikusumah lantas menyerukan kepada para pengikutnya bagi yang telah memeluk agama (khususnya Katolik) agar tidak balik ke agama Sunda Wiwitan, kecuali telah menyatakan secara resmi dan mendapatkan izin. Namun, seruan Pangeran Djatikusumah terhadap para pengikutnya disalah artikan oleh

---

<sup>49</sup> Nuhrison M.Nuh, *op.cit.*

<sup>50</sup> Anas Saidi, Abdul Aziz, dkk. 2004. *Menekuk Agama, Membangun Tahta (Kebijakan Agama Orde Baru)*. Depok: Desantara, hlm.310. dalam Achmad Rosidi. 2011. *Perkembangan Paham Keagamaan Lokal di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, hlm.31

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 312

masyarakat luar, ia dituduh melakukan seruan murtad massal terhadap para pengikutnya.<sup>52</sup> Peristiwa ini lantas berdampak terhadap eksistensi PACKU.

PACKU secara resmi dibubarkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melalui surat keputusan No.44 Tahun 1982. Pembubaran ini didasarkan oleh pelbagai pertimbangan, antara lain:<sup>53</sup>

1. Ajaran PACKU pada hakikatnya sama dengan ADS yang sebelumnya telah dilarang oleh Panca Tunggal Kabupaten Kuningan dengan SK No.001/KPTS/Dk 1964 tanggal 12 Februari 1964.
2. Untuk menjadi PACKU diharuskan menandatangani surat pernyataan keluar dari agama yang dianutnya dan masuk menjadi aliran kepercayaan.
3. PACKU telah menimbulkan kegelisahan atau keresahan di kalangan umat beragama, dan telah mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat sekitarnya.
4. PACKU mengganggu kerukunan beragama, dan dapat menjadikan seseorang beragama menjadi murtad dan kafir karena keluar dari agama yang dianutnya.
5. PACKU telah melakukan upacara perkawinan menurut tata caranya sendiri, dan hidup bersama sebagai suami istri tanpa mendapatkan pengesahan dari Kantor Catatan Sipil.

Setelah dibubarkannya PACKU para masyarakat adat ini menyebut diri mereka sebagai masyarakat adat AKUR. Melalui AKUR Pangeran Djatikusumah menyampaikan ajarannya, namun AKUR ini bukanlah sebuah organisasi

---

<sup>52</sup> JojoYuniartha Siahaan, *op.cit.*

<sup>53</sup> *Ibid.*,

kepercayaan seperti Organisasi Kebatinan Satuan Rakyat Indonesia “Murni” (Sri Murni), Sadar Langsung, Sari Budaya ataupun PACKU yang dulu. AKUR disini untuk tetap mempertahankan adat dan nilai-nilai yang selama ini telah diajarkan oleh Pangeran Madrais.

Ajaran-ajaran utama dari AKUR ini diantaranya adalah:<sup>54</sup> a. *Percaya Ka Gusti Sikang Sawiji-wiji* (Percaya Kepada Tuhan Yang Maha Esa); b. *Ngaji badan* (intropeksi/restropeksi diri); c. *Akur rukun jeung sesama bangsa* (hidup rukun dengan sesama); d. *Hirup ulah pisah di mufakat* (mengutamakan musyawarah mufakat); e. *Hirup kudu silih tulungan* (hidup harus tolong menolong).

Selanjutnya sebagai pedoman budi luhur bagi masyarakat adat ini adalah cara-ciri manusia dan cara-ciri bangsa. Arti kata cara mengacu pada pemaknaan akan ketentuan perilaku hidup, dan ciri adalah sebuah manifestasi sifat. Cara-ciri manusia terdiri dari :<sup>55</sup>

1. *Welas Asih*

Sebagai seorang manusia kita harus memiliki sifat berprikemanusiaan, yang didalamnya mengandung rasa kasih (welas asih) yang memancar dari budi luhur.

2. *Undak Unik*

Pada manusia yang sadar akan adanya struktur dalam keluarga, yang mana didalamnya ada pelbagai sebutan yang menunjukkan perbedaan seperti Bapak, ibu, anak, kakak, nenek, cucu, kemenakan dan sebagainya.

---

<sup>54</sup> Nuhriison M.Nuh, *op.cit*

<sup>55</sup> *Ibid.*,

Kesadaran serupa itu hanya terdapat dalam kehidupan manusia, pada *undak* untuk ini berarti adanya tingkatan dan sebutan.

### 3. Tata Krama

Selaras dengan adanya *undak unik* maka didalam kehidupan masyarakat manusia mengenal adanya tata krama atau etika agar terciptanya kerukunan hidup baik dalam keluarga maupun masyarakat.

### 4. *Budi Daya Budi Basa*

Budi daya budi basa dimaksudkan untuk pengendalian diri. Budi daya dan budi basa merupakan pelaksanaan tata krama, dimana manusia adalah makhluk yang berbudi.

### 5. *Wiwaha Yuda Negara*

*Wiwaha Yuda Negara* merupakan bentuk kesadaran sebagai manusia berbudi luhur dalam melaksanakan gerak hati dan pikiran haruslah memakai pertimbangan-pertimbangan dan memerangi rasa dan pikir pada saat keduanya dipengaruhi oleh sifat-sifat di luar sifat kemanusiaan.

Selanjutnya adalah cara ciri bangsa yang berangkat dari filosofis adanya suatu bangsa merupakan kehendak Tuhan, lahirnya kita sebagai manusia yang merupakan bagian dari bangsa-bangsa juga merupakan kehendak Tuhan, kita tidak dapat memilih ingin menjadi suatu bangsa. Adanya keragaman bangsa yang ada juga merupakan kehendak Tuhan. Jadi cara ciri bangsa adalah adanya pelbagai rupa, bahasa, adat, aksara, dan kebudayaan.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid.*,

Selain itu sebagai masyarakat adat, masyarakat adat AKUR memiliki kekhasan budaya seperti adanya upacara *Seren Taun*. *Seren Taun* merupakan ritual syukuran panen dari masyarakat agraris Sunda yang dilakukan sehabis panen. Nama *Seren Taun* kerap berganti nama seperti *Karayunan* (1920-1939) dan *Bendrong* (1940-1976) namun pada intinya kegiatan tersebut merupakan bentuk syukur dari masyarakat adat Cigugur terhadap hasil panen yang didapatkan. Masyarakat adat ini juga memiliki bukti literasi berbentuk manuskrip yang dituliskan oleh Pangeran Madrais sebagai tuntunan hidup masyarakat adat.

Masyarakat adat AKUR ini berpusat di Cigugur, Kuningan. Namun kelompok masyarakat adat AKUR tidak hanya berada di Cigugur, mereka tersebar pula di beberapa daerah di Jawa Barat, yaitu : Cisuru, Cigugur, Bunter, Banjar; Tasikmalaya, Garut, Bandung, Cibulit Tabog; dan Subang. Setiap daerah tersebut memiliki Ais Pangampih yang merupakan perwakilan masyarakat AKUR di setiap daerah dan berfungsi untuk memberikan ajaran dan menyelesaikan sengketa

#### **4.2 Silsilah Keturunan Pangeran Madrais Sadewa Alibassa**

Masyarakat AKUR Cigugur mengamini Pangeran Madrais sebagai pemimpin adat mereka yang pertama. Semasa hidupnya Pangeran Madrais menikah sebanyak empat kali, diantaranya adalah :

- Ibu Ratu Empuh, tidak memiliki keturunan
- Ibu Ratu Munigar, tidak memiliki keturunan
- Ibu Ratu Siti Yaman, memiliki 2 anak yang bernama :
  1. Pangeran Tedja Buana Alibassa (akan dijelaskan lebih lanjut dibawah)
  2. Ibu Ratu Suka Inten, memiliki 1 anak yang bernama:

- Ibu Ratu Mas Pakungwati

- Ibu Ratu Enceh, tidak memiliki keturunan

Sepeninggalannya Pangeran Madrais pada tahun 1939 membuat tongkat kepemimpinan masyarakat berpindah ke anaknya yaitu Pangeran Tedja Buana Alibassa. Pangeran Tedja Buana semasa hidupnya menikah dua kali yaitu dengan :

- Rd. Nyi Mas Arinta, pernikahan ini memiliki 3 anak yaitu:
  1. Ratu Pusaka Nawangsasih Alibassa, mempunyai 2 orang anak yaitu :
    - (1) Rd. Purwanto Danarasa
    - (2) Rd. Ny. Siti Roeningsih
  2. Ratu Dewi Alibassa, memiliki 7 orang anak yaitu :
    - (1) Rd. Djoko Purnowo
    - (2) Rd. Djoko Kuntowo
    - (3) Rd. Djaka Suryasa
    - (4) Rd Djoni Kursono
    - (5) Rd. Dodi Hudaya
    - (6) Rd. Sudrajat Andaru Ningrat
  3. Ratu Siti Djenar Alibassa, memiliki 9 orang anak:
    - (1) Rd. Bona Ventura Surapati
    - (2) Rd. Dadang Andaru
    - (3) Rd. Yanto Suryana
    - (4) Rd. Tince Ratna Suminten
    - (5) Rd. Sasye Sriningsih

(6) Rd. Djaka Rumantaka

(7) Rd. Ikhsan Titop Purwo Sucipto

(8) Rd. Ariston Danuwarsa

(9) Rd. Lina Djuarnaningsih

- Setelah Rd. Nyi Mas Arinta meninggal Pangeran Tedja Buana menikah dengan Rd. Siti Saodah, memiliki 7 orang anak yaitu:

(1) Ratu Putri Rarasantang Alibassa

(2) Pangeran Djatikusumah Alibassa

(3) Ratu Siti Sondari Alibassa

(4) Ratu Siti Duryat/Purwaningsih Alibassa

(5) Pangeran Sadewa Alibassa

(6) Pangeran Wishnu Alibassa

(7) Pangeran Wissa Alibassa

Pangeran Tedja Buana Alibassa meninggal pada tanggal 5 April 1978, sesuai dengan pesan manuskrip yang telah dituliskan oleh Pangeran Madrais sewaktu masih hidup tingkat kepemimpinan masyarakat AKUR diturunkan kepada Pangeran Djatikusumah. Manuskrip itu berbunyi :<sup>57</sup>

*“Yeu kalamula aya agama sunda nu raja ratu*

*Sunda baheula nya nu ngarana ilmu pameradan ngarajina*

*Ngajar mati dialajar mati nyatrus turun kaputra*

*Punggung jati nu jatikusumah nya euweuh deui taya*

*iati ajar mati diajar mati uga meh katrusan*

---

<sup>57</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 371Pdt/2016/PT.BDG.

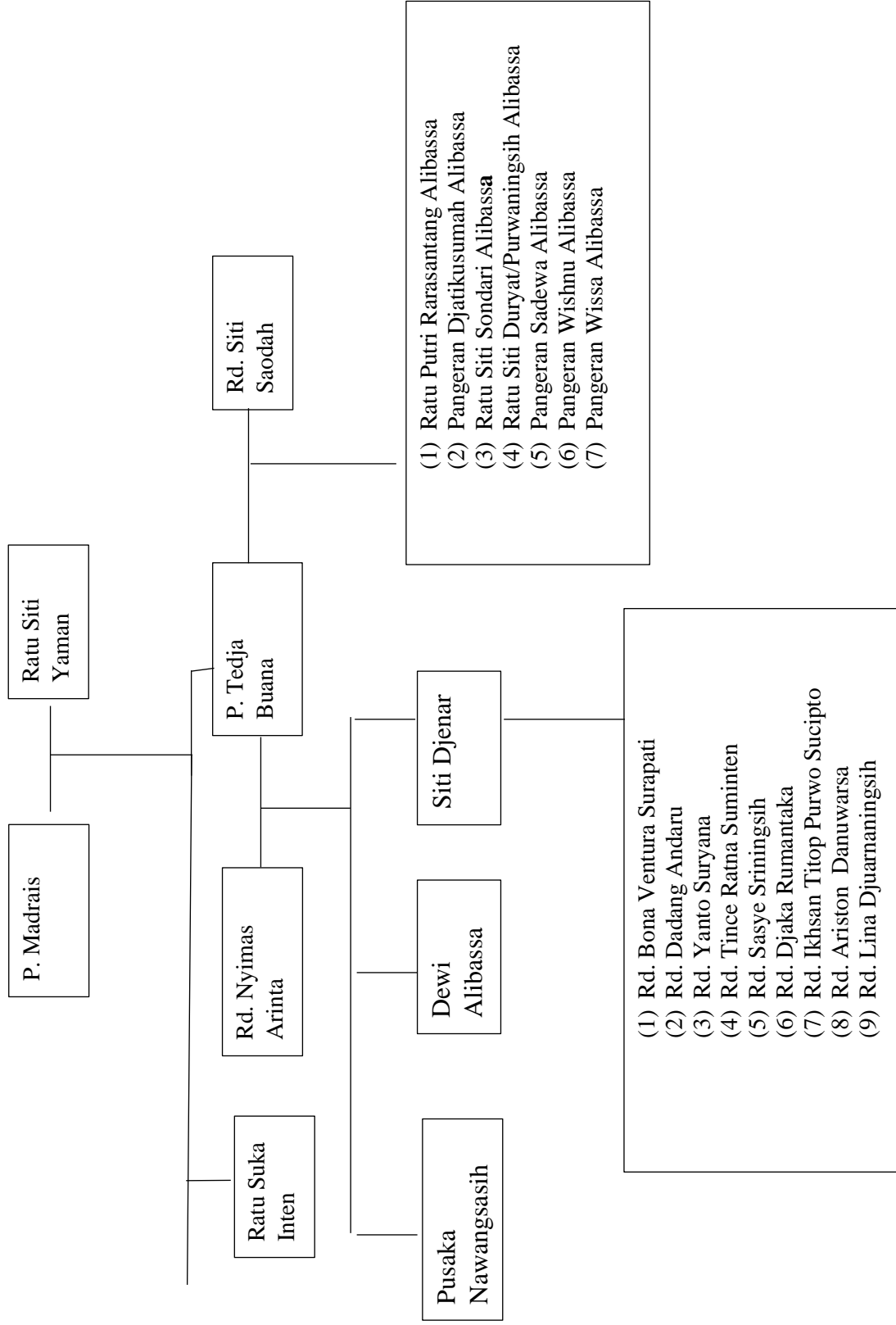
*ku ratu ratu raja cina belanda hindu ari ieu  
raja anyar anu anyar nu keur kakara kata ngatakeun  
blok na buah nadi lawang pasenetan kakara  
eukeur ajar dialajarkeun agama hirup nu hirup  
ayana di dunya tea nu mana aya ngiblating ratu.”*

Terjemahan bebasnya : “Ini asal mula tuntunan adat Sunda Wiwitan yaitu ilmu kesempurnaan, hirup sajatining mati, diturunkan pada putra Jatikusumah tidak lain untuk menata kehidupan yang menegakkan keadilan”.

Atas dasar manuskrip itu maka Pangeran Djatikusumah diangkat menjadi pemipin AKUR yang ketiga. Penggugat yang saat ini menuntut kepemilikan tanah di Blok Mayasih adalah Djaka Rumantaka, beliau merupakan anak dari Ratu Siti Djenar Alibassa yang merupakan hasil pernikahan Pangeran Tedja Buana dengan Rd. Nyi Mas Arinta. Jadi Djaka Rumantaka sendiri masih memiliki garis keturunan dari pemimpin adat.



**Bagan 4.1 Silsilah Keturunan Pangeran Madraais**



Sumber : Diolah Peneliti, 2017

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### 5.1 Tanah *Ulayat* Perspektif Masyarakat AKUR Cigugur

Masyarakat adat pada umumnya memiliki keterikatan yang kuat dengan tanah dan ruang. Tanah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi masyarakat adat. Tanah sebagai ruang dalam analogi Lefebvre sendiri merupakan sebuah ruang absolut. Ruang absolut merupakan ruang mutlak perpaduan antara agama dan politik, ruang ini biasanya dipengaruhi oleh seorang pemuka agama atau *priestly class* yang mampu mempengaruhi orang lain.<sup>58</sup> Dalam kasus ini yang memberikan pengaruh terhadap cara pandang tanah masyarakat adat adalah pangeran (ketua adat), sepuh adat dan para tokoh adat.

Tanah merupakan tempat dimana masyarakat adat tinggal dan memperoleh penghidupan.<sup>59</sup> Setiap kelompok masyarakat adat memiliki pemahaman yang beragam tentang tanah dan juga tanah *ulayat* bergantung pada ajaran, budaya dan lingkungan hidup mereka. Bagi masyarakat AKUR Cigugur tanah merupakan ruang hidup, ruang budaya, ruang hidup budaya dan ruang hidup tradisi.<sup>60</sup> Ketika ruang hidup mereka telah terambil maka lebih jauh akan berdampak kepada eksistensi mereka. Jadi tanah merupakan suatu medium yang sangat penting demi keberlangsungan hidup dan eksistensi mereka.

---

<sup>58</sup> Henri Lefebvre, *op.cit*, hlm.240

<sup>59</sup> Nurus Zaman, *op.cit*, hlm.100

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Kang Okky Satrio, Girang Pangaping (Sesepuh Adat), pada tanggal 23 November 2017.

Masyarakat AKUR Cigugur memahami tanah terbagi dalam 2 (dua) jenis yakni tanah adegan dan tanah amparan.<sup>61</sup> Tanah adegan merupakan raga atau jasmani diri kita, sedangkan tanah amparan merupakan tanah yang kita pijak. Tanah adegan menunjukkan kedirian, eksistensi kita, sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Tanah adegan tempat bersemayamnya personal karakter, nilai-nilai yang ada dan *culture personality* di setiap individu, ketika individu tersebut sudah keluar personal karakternya dapat dikatakan individu tersebut sudah terjajah.<sup>62</sup> Berdasarkan pemaparan Pak Ira Indrawardana, selaku Dosen Universitas Padjajaran dan bagian dari masyarakat adat :

“.....ada pemahaman kalau tanah adegan sudah terjajah, maka tanah amparan pasti terjajah, namun sejauh tanah adegan belum terjajah maka masih bisa memperjuangkan tanah amparan”<sup>63</sup>

Menurut Ira Indrawardana seorang individu harus menjaga tanah adegannya dengan baik. Ketika tanah adegan yang mana dapat diartikan kedirian seorang individu sudah terjajah, tanah amparan yang dia pijak sudah pasti terjajah. Tapi selama tanah adegan belum terjajah maka masyarakat harus tetap memperjuangkan tanah amparan mereka.

Tanah adat atau tanah *ulayat* dalam masyarakat adat AKUR Cigugur dimaknai sebagai tanah komunal yang digunakan untuk kepentingan orang banyak.<sup>64</sup> Pemahaman tanah *ulayat* sendiri sudah diatur dalam manuskrip yang

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Pak Ira Indrawardana, dosen Antropologi Universitas Padjajaran sekaligus masyarakat adat AKUR Cigugur pada tanggal 22 November 2017.

<sup>62</sup> *Ibid.*,

<sup>63</sup> *Ibid.*,

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Kang Okky Satrio, Girang Pangaping (Sesepuh Adat), pada tanggal 23 November 2017.

telah dituliskan oleh Pangeran Madrais dengan aksara Cacarakan dan berbahasa Sunda. Berikut ini adalah bunyi manuskrip yang telah dituliskan oleh Pangeran Madrais seorang ketua adat semasa hidupnya :<sup>65</sup>

*“i[y]eu ta[n]nah lamunna dék sah, kudu manurut ta[n]nah asing kara[n]na i[y]eu bumi saeusi[n]na kalawan kaka yaan roh para arwah pakumpul[l]an sasat i[y]eu barang atawa éta barang geus teu beu[n]nang dibagi waris ku putra garwa pon ku ahli waris saperti barang wiraya(t) atawa barang pro jalma lu wih atawa barang gupremén”*

Terjemahan: “Tanah ini, jika mau disahkan harus mengikuti tanah lainnya, karena bumi serta isinya, dengan kekayaan peninggalan para leluhur, merupakan sesuatu tidak boleh dibagi waris oleh anak dan istri, begitu juga ahli waris seperti barang wasiat, atau milik warga bersama, atau milik pemerintah.”

Dari penjelasan manuskrip diatas tanah *ulayat* sendiri merupakan tanah peninggalan para leluhur yang tidak boleh dibagi waris. Tanah tersebut merupakan tanah kepemilikan warga bersama. Pesan berikutnya tentang tanah yang tertulis dalam manuskrip adalah sebagai berikut:<sup>66</sup>

*“Juga maka satu ta[n]nah jangan seta[r]ranya ta[n]nah kraton, ta[n]nah pasar, ta[n]nah alun-alun, la itu dari mémangnya uda tida ke[n]na dirampas, dimatiken daripada orang yang laénnya salaénnya, itu ta[n]nah kasimpen yang betul dengan hor[m]mat.”*

Terjemahan: “Juga janganlah suatu tanah disetarakan dengan tanah keraton. Tanah pasar, tanah alun-alun, semua itu sudah tidak boleh dimiliki, tidak boleh dimiliki oleh orang per orang, tanah tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik.”

Pesan kedua yang dituliskan oleh Pangeran Madrais ini menyampaikan bahwa tanah tersebut janganlah tanah disetarakan dengan tanah keraton, tanah

---

<sup>65</sup> Tedi Permadi. 2016. *Identifikasi Tiga Naskah Wasiat Madrais S. Allibasa Koleksi Paseban Tri Panca Tunggal, Cigugur, Kuningan*. Jakarta: Kerja Sama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan Universitas Leipzig, Jurnal Manassa Manuskripta Vol.6, No.2 2016

<sup>66</sup> *Ibid.*,

pasar, tanah alun-alun. Tanah-tanah yang memang dikategorikan sebagai tanah adat bukan untuk dimiliki individu melainkan harus dimanfaatkan dengan baik. Pesan tersebut langsung dituliskan oleh Pangeran Madrais sebagaimana yang di manuskrip tertulis :<sup>67</sup>

*“Yeu nu ngaran nu meu[n]nang ngaran, nu bu[w]atanna[n]na nu ku tangan Madrais. Anu metak[n]na geus teu beu[n]nang aya jalma nu wa[n]ni ngarobah, jeung saturun turunna kaya [ta] putra putu jeung mantu té[y]a”*

Terjemahan. “Yang menyatakan di bawah ini ini adalah Madrais, sehingga tidak boleh ada orang yang merubahnya, serta turun temurun sampai anak cucu dan mantunya”

Pesan yang berada di manuskrip tersebut lah yang menjadikan landasan masyarakat dalam memandang sebuah tanah yang dikategorikan tanah *ulayat* adalah tanah komunal yang tidak dapat dibagi wariskan dan memiliki fungsi bagi masyarakat banyak.

### **5.1.1 Kosmologi Ruang Masyarakat AKUR Cigugur**

Masyarakat AKUR Cigugur memahami kosmologi dalam memandang ruang. Kosmologi yang dipahami oleh masyarakat AKUR Cigugur merujuk pada pemahaman yang telah diturunkan oleh *karuhun*/ leluhur. Lefebvre menyebutkan bahwa ruang dikonseptualisasi dan dikonstruksi oleh para ahli, seniman, profesional, teknokrat, arsitek dan perencana tata ruang.<sup>68</sup> Dalam konteks masyarakat adat yang memberikan pemahaman terkait produksi ruang bukan hanya para ahli seperti yang disampaikan oleh Lefebvre, melainkan ruang disini dikonseptualisasikan pula oleh Pangeran (pemimpin adat) dan para sepuh adat.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*,

<sup>68</sup> Henri Lefebvre, *Op.cit*, hlm. 38

Konseptualisasi yang dimaksud Lefebvre adalah bagaimana para ahli merancang atau memberikan pemahaman terhadap sebuah ruang dengan pengetahuan, kode dan tanda-tanda yang berkaitan dengan ruang tersebut.<sup>69</sup> Pangeran dan para sepuh adat dalam hal ini memiliki peran yang sama selayaknya para ahli seperti arsitektur, teknokrat, ahli perancang ruang dan professional yang telah disebutkan oleh Lefebvre, pangeran dan sepuh adat berperan dalam mengkonseptualisasikan ruang. Pemahaman terhadap ruang melalui pengetahuan kosmologi ruang yang telah diturunkan oleh leluhur. Pemahaman kosmologi ruang yang disampaikan oleh Pangeran dan sepuh adat mempengaruhi representasi ruang dan pemahaman masyarakat dalam memandang suatu ruang ataupun tanah.

Okky Satrio sebagai Girang Pangaping (Sepuh Adat) menyampaikan bahwa:

“Di setiap bagian tubuh kita kami melihat ada kosmologis ruang, itu adalah satu hamparan rangkaian anatomi tubuh, Sang Hyang Sirah sampai di Cirebon sana pinggir laut itu Sang Hyang Dampal, Kaki”<sup>70</sup>

Penjelasan tersebut merujuk pada bahwa ruang dan manusia adalah sebuah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Manusia memiliki pelbagai saraf yang saling terhubung demi berjalannya suatu fungsi organ. Begitu juga dengan pemahaman tentang alam dalam masyarakat adat AKUR Cigugur, mereka meyakini bahwa alam adalah layaknya suatu hamparan tubuh yang terdiri dari pelbagai jaringan, saraf, dan organ layaknya tubuh manusia yang harus saling terhubung. Dengan adanya pemahaman seperti itu yang disampaikan oleh sepuh adat membuat masyarakat adat harus menjaga alam dan leluhur mereka mulai dari

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm.33.

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Kang Okky Satrio, Girang Pangaping (Sesepuh Adat), pada tanggal 23 November 2017.

*Sang Hyang Sirah* (ujung kepala) hingga *Sang Hyang Dampal* (ujung telapak kaki).<sup>71</sup> *Sang Hyang Sirah* yang diamini oleh masyarakat adat AKUR sendiri adalah Gunung Ciremai, di setiap gunung tentunya memiliki titik-titik mata air, titik-titik mata air ini layaknya tubuh manusia harus lah mengalir ke seluruh bagian tubuh, ketika ada fungsi yang tidak berjalan dengan baik, maka pengaliran air tidak bisa berjalan dengan baik.<sup>72</sup> Maka dari itu masyarakat adat dalam mengabstraksi sebuah ruang atau alam adalah sebuah kesatuan yang utuh layaknya anatomi tubuh manusia, saling terkait dan terhubung. Pemahaman spiritualitas kosmologi yang diturunkan oleh ketua adat dan leluhur ini mempengaruhi masyarakat adat dalam menjaga dan memperjuangkan tanah dan wilayah mereka.

## **5.2 Produksi Ruang Blok Mayasih oleh Masyarakat AKUR Cigugur**

Tanah yang menjadi perebutan Djaka Rumantaka dan masyarakat adat AKUR adalah rumah yang ditinggali oleh salah satu abdi dalam yang juga merupakan seorang seniman yaitu E.Kusnadi bersama keluarganya. Keluarga Kusnadi dalam permasalahan ini merupakan representasi dari masyarakat adat yang memahami nilai-nilai komunalitas dalam kesehariannya. Selayaknya masyarakat komunal, keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat adat ini telah menganggap rumah tersebut merupakan rumah pendukung bukan untuk dimiliki secara pribadi.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*,

<sup>72</sup> *Ibid.*,

Rumah ini terletak di Blok Mayasih RT.029 RW.010, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Rumah ini dibangun ditanah seluas 16 bata atau sekitar 224 m<sup>2</sup>.

**Gambar 5.1 Rumah Sengketa Blok Mayasih**



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2017

Sebelum menjadi rumah pendukung Paseban Tri Panca Tunggal dahulu rumah ini merupakan gunung batu atau kebun batu. Lefebvre dalam triad konseptualnya menyampaikan bahwa dalam penciptaan sebuah ruang yang paling pertama adalah *spatial practice perceived* atau praktik spasial merujuk pada dimensi material dari aktivitas sosial dan kegiatan saling berinteraksi dalam sebuah ruang.<sup>73</sup> Abah Badra salah satu warga adat AKUR Cigugur menyampaikan bahwa:

“Tanah itu dahulunya mah Gunung Batu saya biasa memakai lahan itu untuk berolahraga dan kadang-kadang ditanami itu.”<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Lefebvre, *op.cit*, hlm. 38

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Abah Badra pada tanggal 25 November 2017



Berdasarkan penjelasan dari masyarakat adat tersebut, sebelum tanah-tanah di Blok Mayasih bertransformasi menjadi gereja, rumah tinggal dan rumah sakit merupakan sebuah daerah gunung batu yang berfungsi sebagai lahan olahraga dan tempat bertanam masyarakat adat. Dalam hal ini masyarakat sebagaimana yang telah dikatakan Lefebvre sedang melakukan praktik spasial dalam sebuah ruang, dimana masyarakat merasakan ruang tersebut sebagai tempat mereka berolahraga dan melakukan kegiatan bercocok tanam. Alasan dibalik berubahnya fungsi tanah tersebut menjadi gereja, rumah sakit dan rumah pendukung Paseban berdasarkan keterangan Okky Satrio salah satu pembina adat :

“Ini yang jadi rumah sakit dan Pastura, itu dulu bagian dari sini kenapa diserahkan karena kan fungsinya publik untuk umum.”<sup>75</sup>

Fungsi publik yang dimaksudkan oleh Okky Satrio dalam konteks ini adalah bagaimana tanah tersebut dapat dimanfaatkan demi kepentingan komunal masyarakat adat. Tanah tersebut dapat bertransformasi menjadi rumah sakit, gereja dan rumah pendukung Paseban --rumah keluarga E.Kusnadi-- karena melihat kebutuhan dari masyarakat adat AKUR Cigugur pada saat itu dan akhirnya dibangun sebuah ruang baru yang memiliki fungsi komunal. Membicarakan ruang tidak dapat terpisah dari sejarah dan waktu seperti yang disampaikan Lefebvre bahwa ruang dapat terus diproduksi dan sangat terikat oleh waktu. Maka dari itu untuk membahas rumah yang menjadi tanah sengketa ini harus dirunut melalui proses sejarah ruang tersebut dibuat.

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Okky Satrio pada tanggal 25 November 2017

Pada tahun 1972 berdasarkan penjelasan Ibu Kristina Mimin Saminah, dahulu suaminya E.Kusnadi sudah mau dibelikan rumah oleh Bapaknya yaitu Bapak Sumadiharja. Namun saat Pak Sumadiharja ke Cirebon ia ditanyakan oleh Pangeran Tedja Buana :

*saya mau Tanya ke Pak Sumadiharja. Sum, ari anak Suma engke ek dimana? Anu geus kawin teh saha ngarana? Engkus ti jawabnya, nya ari kahoyongna mah di Garut, da tos Sepuh eyangna kita. Ah ceunah muntiasa mah ulah di Garut. Di dieu wae cenah kitu geus tong hayang meser-meser bumi, ngademel bae tah di dinya, taneuh nu didinya tapi ulah anu handapeun tangkal muncang, eta mah lain pi imaheun. Teras tos kitu teh ditaros, ari pek teh ceunah. Ari kitu mah bade ngademel bumi we didinya. Jadi duit 450 ribu mah dicepeng ku pun Bapak (mitoha) di peseur-peseurkeun karena bahan tah di dinya, tapi nyalikan eta teh sok keresa ka incuk putu ge mual edeuk dicandak deui. Tapi lamun turunan na ge dehes ka Gedong, kahiji kudu maturan Acep, Acep itu Pangeran Djatikusumah. Kembangkeun budaya jeng kesenian.”<sup>76</sup>*

Terjemahan: “Sum, anak Suma nanti mau tinggal dimana? Yang udah nikah itu siapa namanya? Engkus jawabnya, pengennya mah di Garut karena kakeknya sudah renta. Yah kalau bisa jangan di Garut, disini aja katanya, jangan mau beli rumah, bikin aja tuh disana (Blok Mayasih), tanah yang disana tapi jangan yang dibawah pohon kemiri, itu bukan lahan untuk rumah. Terus habis itu ditanya, begini, kalau gitu mah mau bikin rumah aja disana, jadi uang 450 rb tetap dipegang sama mertua saya dan dibelikan untuk bahan-bahan bangunan, mendiami tanah itu nantinya juga tidak akan diminta kembali. Tapi kalau turunannya mengabdikan ke Gedong “Paseban”, pertamanya harus menemani Acep “Pangeran Djatikusumah”. Kembangkan budaya dan kesenian..”

Pesan Pangeran Tedja Buana tersebut adalah menyuruh anaknya Sumadiharja yaitu Kusnadi selaku masyarakat adat untuk membangun rumah di Blok Mayasih yang berlokasi dekat dengan Paseban. Namun, dengan syarat Kusnadi tersebut harus membantu mengembangkan kebudayaan dan kesenian masyarakat

---

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Kristina Mimin Saminah pada tanggal 25 November 2017

adat Cigugur. Atas dasar pesan yang diamanatkan oleh Pangeran Tedja Buana tersebut Kusnadi akhirnya membangun sebuah rumah di tanah tersebut dan pembangunan selesai pada tahun 1973. Sebelum pembangunan rumah tersebut dimulai diadakan upacara tradisi menurut adat budaya Sunda sebagai ungkapan rasa syukur dan juga salah satu bentuk pengumuman kepada masyarakat Cigugur Kuningan.<sup>77</sup> Upacara tersebut dihadiri oleh warga sekitar, beberapa keluarga Pangeran Tedja Buana Alibassa, Sumadiharja, Pangeran Djatikusumah dan turut diketahui oleh Ratu Siti Djenar Alibassa.

E. Kusnadi sendiri memiliki latar belakang sebagai seorang seniman dan ahli ukir.<sup>78</sup> Lefebvre menjelaskan representasi ruang merupakan ruang yang dirancang oleh seorang ahli, seniman, arsitektur dan lainnya. Representasi ruang terdiri dari pelbagai simbol, tanda ruang, jargon, kodifikasi yang dirancang oleh seorang ahli.<sup>79</sup> Keahlian Kusnadi di bidang seni tersebut membuat dirinya merancang rumah dengan pelbagai simbol-simbol yang memiliki keterkaitan dengan Paseban Tri Panca Tunggal seperti relief, ukiran-ukiran, lukisan dan patung.

---

<sup>77</sup> Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II (E.Kusnadi dan Kristina Mimin Saminah) Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 09//Pid.G/2009/PN.KNG

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan Pak Ira Indrawardana

<sup>79</sup> Andrzej Zieliński. 2007. *Space and Social Theory*. London: Sage Publications, hlm.74

**Gambar 5.2 Relief Rumah Blok Mayasih**



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2017

Rumah ini dirancang dengan relief khas Paseban Tri Panca Tunggal yang bernama *Oyod Mingmang*.<sup>80</sup> Berdasarkan keterangan ukiran yang ada di Paseban, *oyod mingmang* sendiri secara filosofis menggambarkan rangkaian akar yang saling berkaitan sehingga membentuk satu kekuatan yang utuh yaitu kekuatan persatuan dan kesatuan atas dasar adikodrati. Manusia pada dasarnya memiliki akar kepribadian, akar budaya dan akar bangsanya masing-masing. Hal ini menandakan bahwa manusia pada dasarnya beragam, tapi keberagaman yang ada hendaknya menjadi kekuatan persatuan dan tidak saling merusak antara satu akar budaya dengan akar budaya yang lain.

---

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan Ira Indrawardana, pada tanggal 28 November 2017

**Gambar 5.3 Patung-Patung Rumah Blok Mayasih**



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2017.

Rumah ini juga dirancang oleh Kusnadi dengan adanya patung-patung yang memiliki keterkaitan dengan masyarakat adat AKUR Cigugur yaitu patung tari buyung dan domba. Tari buyung ini sendiri merupakan tarian khas asli Cigugur yang setiap tahun selalu ditampilkan dalam upacara Seren Taun.<sup>81</sup> Buyung sendiri adalah alat yang digunakan oleh sebagian wanita desa pada zaman dulu untuk mengambil air di sungai, danau, mata air, atau di kolam dengan bahan yang terbuat dari logam atau tanah liat.<sup>82</sup> Tarian ini merupakan tarian untuk mengingat sejarah bahwa pada zaman dahulu masyarakat mengambil air dengan alat buyung tersebut.

Patung kambing lendit juga memiliki keterkaitan dengan masyarakat AKUR Cigugur. Berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat kambing lendit ini merupakan hewan yang dibawa oleh Pangeran Madrais pada tahun 1936 saat meredam eksplosifitas dari Gunung Ciremai bersama 200 orang masyarakat

---

<sup>81</sup> Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. 2011. *Tari Buyung*. Diakses dari <http://www.disparbud.jabarprov.go.id/wisata/dest-det.php?id=387&lang=id> pada tanggal 19 Desember 2017 pukul 00.24 WIB

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan Ira Indrawardana pada tanggal 28 November 2017

adat yang membawa gamelan.<sup>83</sup> Selain simbol-simbol yang dijabarkan diatas masih terdapat ornamen-ornamen lain di rumah ini yang memiliki keterkaitan dengan kebudayaan yang berada dengan Cigugur.

Praktik spasial yang dilakukan dalam ruang ini pada kesehariannya adalah rumah yang ditinggali oleh keluarga seorang seniman Kusnadi. Namun rumah tersebut memang dirancang sesuai tujuan awal yaitu untuk mendukung kegiatan kebudayaan masyarakat adat AKUR Cigugur maka dari itu representasi ruang dilakukan dengan memberikan pelbagai ornamen yang berkaitan dengan Paseban di rumah tersebut. Setelah ruang tersebut dirancang menurut Lefebvre, ruang akan menjadi tempat hidup bagi penduduk dan pengguna ruang. Ruang ini merupakan ruang gabungan dari *perceived* dan *conceived space*. Maka dari itu ruang representasional ini merupakan ruang yang terdominasi oleh tamsilan dan simbol tertentu. Selain memiliki bakat sebagai seorang seniman E.Kusnadi merupakan salah satu pemandu wisata ketika ada tamu yang datang ke Paseban Tri Panca Tunggal. Maka dari itu rumah tersebut seiring berjalannya waktu bukan saja sebagai rumah tinggal tapi melainkan menjadi rumah satelite yang mendukung kegiatan Paseban. Ira Indrawardana menjelaskan bahwa rumah tersebut:

“Historisnya setiap tamu-tamu yang datang ke Paseban, keraton itu pasti selalu nginep di rumah. Jadi rumah kami itu kayak satelitnya paseban, tamu-tamu besar yang apa dari jaman dahulu karena Bapak saya termasuk tour guide, yah kalo bertamu ya bapak saya kayak menjelaskan, apa sih Cigugur itu, apa sih ajarannya. Jadi punya cerita panjang, tokoh-tokoh Jawa Barat, nasional, mahasiswa yang udah jadi doktor itu dari rumah yang untuk meneliti tentang Cigugur atau apa atau apa.”<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan Okky Satrio pada tanggal 25 November 2017

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan Ira Indrawardana pada tanggal 21 November 2017

Rumah tersebut akhirnya bukan hanya diperuntukan untuk tempat tinggal melainkan juga untuk tempat berkunjung para tamu yang datang ke Paseban. Rumah tersebut memiliki cerita yang panjang, rumah tersebut telah menjadi tempat bermalam para tokoh besar, mulai dari mahasiswa hingga tokoh nasional. Selain itu rumah ini juga menjadi tempat perawatan pusaka-pusaka yang ada di Paseban. Jadi memang rumah ini menjadi rumah yang pendukung kegiatan Paseban (*representational space lived*) dengan pelbagai simbol terkait kebudayaan Cigugur yang sengaja dirancang oleh seorang seniman. Fungsi rumah tersebut akhirnya membuat rumah tersebut sudah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan bagi masyarakat adat.

#### **5.2.1 Analisis Produksi Ruang Blok Mayasih Masyarakat Adat AKUR Cigugur**

Lefebvre dalam teori triad spasial memproduksi ruang dengan cara: *perceived, conceived, dan lived space*. Berikut ini analisis peneliti tentang analisis produksi ruang di Blok Mayasih oleh masyarakat adat AKUR Cigugur berdasarkan Lefebvre:

##### ***Spatial Practice Perceived:***

*Spatial practice perceived* merujuk pada dimensi material dari aktivitas sosial dan kegiatan saling berinteraksi dalam sebuah ruang. Sebelum menjadi rumah tinggal salah satu masyarakat adat, tanah tersebut merupakan gunung batu yang biasa dipakai masyarakat untuk melakukan kegiatan berolahraga dan bertanam.

### ***Representations of Space Conceived***

*Representations of Space Conceived* merupakan sebuah ruang yang dikonseptualisasikan. Pesan Pangeran Tedja Buana yang memberikan rumah untuk membantu pengembangan kegiatan kebudayaan dan kesenian di Cigugur membuat rumah tersebut dirancang dengan pelbagai ornament yang memiliki konektivitas dengan Paseban. Seperti yang sudah dijelaskan diatas rumah ini sengaja dirancang dengan kekhasan Cigugur, mulai dari relief, ukiran dan patung-patung yang ada.

### ***Representational Space Lived***

*Representational Space Lived* berarti ruang dimana interaksi antar manusia dapat tercipta, merupakan ruang yang menjadi tempat tinggal pengguna ruang. Sesuai dengan pesan Pangeran Tedja Buana rumah ini ditujukan untuk mendukung kegiatan kesenian Paseban, seiring berjalannya waktu rumah ini tidak hanya menjadi rumah tinggal, melainkan menjadi rumah satelit atau rumah dinas dari Paseban Tri Panca Tunggal dengan pelbagai ornament khas Cigugur yang telah dikonseptualisasikan oleh seorang seniman. Rumah ini menjadi tempat para tamu untuk berkunjung dan beristirahat, selain itu rumah ini juga menjadi tempat menjaga pusaka Paseban.

Selain dari proses produksi ruang yang sebagaimana telah diutarakan Lefebvre, produksi ruang yang dilakukan masyarakat adat sendiri juga dipengaruhi oleh manuskrip dan kosmologi ruang yang diturunkan oleh leluhur. Maka dari itu masyarakat memandang tanah yang memiliki fungsi komunal tidak dapat dibagi wariskan seperti yang digugat oleh Djaka Rumantaka. Kosmologi dalam hal ini



juga berpengaruh pada abstraksi ruang masyarakat. Kosmologi menjelaskan bahwa tanah amparan atau ruang yang terhampar sama halnya bagian dari tubuh manusia.

Ruang bukan dilihat dari satu bangunan fisik saja, melainkan sebagai satu kesatuan ruang yang jika rusak akan mempengaruhi fungsi yang lainnya, maka dari itu tanah ini tetap dipertahankan oleh masyarakat. Namun selayaknya tanah adat yang lainnya, rumah ini tidak memiliki bukti kepemilikan yang kuat. Hal ini karena disebabkan karena Kusnadi sebagai masyarakat adat tidak memiliki data tertulis dari Pangeran Tedja Buana bahwa tanah tersebut diberikan kepada keluarganya, sedangkan hukum saat ini menuntut adanya bukti tertulis.<sup>85</sup> Hal ini lantas yang menyebabkan terbukanya celah persengketaan.

Manuskrip yang berkata bahwa tanah ini tidak boleh dimiliki orang perorang membuat pihak masyarakat adat tidak memiliki bukti administratif yang kuat, keluarga Kusnadi hanya memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) hingga tahun 2008<sup>86</sup>, sedangkan dari pihak Paseban hanya memiliki bukti kikitir atas nama Pangeran Alibassa Alibassa (Pangeran Madrais) tahun 1941 yang kemudian berganti Surat Pajak Bumi (SPP) atas nama Pangeran Tedja Buana. Meskipun SPP tersebut diturunkan dari Pangeran Madrais ke Pangeran Tedja Buana bukan berarti tanah tersebut diwariskan untuk kepemilikan pribadi Pangeran Tedja Buana, melainkan tanah tersebut digunakan untuk komunal masyarakat.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> *Ibid.*,

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Kristina Mimin Saminah pada tanggal 25 November 2017

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Kanti pada tanggal 23 November 2017

### 5.3 Produksi Ruang Blok Mayasih oleh Djaka Rumantaka

Djaka Rumantaka merupakan salah satu keturunan dari Pangeran Tedja Buana, beliau merupakan anak dari Ratu Siti Djenar Alibassa –anak dari pernikahan pertama Pangeran Tedja Buana dengan Raden Nyi Mas Arinta— kelahiran tahun 1960. Djaka Rumantaka dari kecil tinggal di Sumedang. Pada tahun 1964 Djaka Rumantaka dan adiknya H.Ikhsan Purwo Sucipto dijemput oleh keluarga ayahnya untuk pergi ke Sumedang karena kondisi Cigugur yang tidak kondusif.<sup>88</sup> Kondisi saat itu beberapa tokoh ADS ditangkap dan dimasukkan ke penjara maka dari itu dia diamankan ke Sumedang. Djaka Rumantaka baru kembali tinggal di Cigugur pada tahun 1987. Menurut dari pihak masyarakat adat hal ini yang menyebabkan Djaka Rumantaka kurang memahami nilai-nilai yang berkembang di masyarakat adat AKUR Cigugur. Menurut Victor Turner adanya pengaruh kebudayaan yang berbeda dari daerah asal akan berimplikasi terhadap cara pandang dan rekonstruksi kehidupan seseorang.<sup>89</sup> Maka dari itu perpindahan Djaka Rumantaka ke sebuah daerah baru memungkinkan terjadinya pergeseran nilai-nilai komunalitas yang ada di Cigugur.

Djaka Rumantaka dalam hal ini memandang tanah sengketa di Blok Mayasih ialah sebagai asset pribadi yang dimiliki oleh Ratu Siti Djenar Alibassa yang ditempati atau dikuasai oleh pihak ketiga yang bukan merupakan keturunan (*perceived space*).<sup>90</sup> Cara pandang Djaka Rumantaka berbeda dengan masyarakat adat yang mengamini nilai-nilai komunal terhadap tanah. Djaka Rumantaka

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Djaka Rumantaka pada tanggal 25 November 2017.

<sup>89</sup> Victor Turner. 1974. *Liminal to Liminaloid, In Play, Flow and Ritual*. Texas: Rice University

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Djaka Rumantaka pada tanggal 25 November 2017.

memandang tanah tersebut sebagai asset individu, bukan sebagai tanah komunal masyarakat adat.

Landasan Djaka Rumantaka memandang tanah tersebut dipengaruhi oleh pernyataan seorang juru tulis bernama Murkanda yang diberikan amanah oleh Pangeran Tedja Buana untuk memberikan tanah kepada tiga anaknya yaitu Ratu Puser Alibassa, Ratu Dewi Alibassa dan Ratu Siti Djenar Alibassa pada tanggal 17 Mei 1970. Berdasarkan keterangan Djaka Rumantaka tanah tersebut diberikan kepada ibunya karena Pangeran Tedja Buana melihat ibunya yang hidup menderita.<sup>91</sup>

Awal mula persengketaan tanah ini dari yang peneliti temukan di lapangan bermula dari proyek renovasi Paseban Tri Panca Tunggal pada tahun 2007 yang diadakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dari pengakuan pihak masyarakat adat dan Djaka Rumantaka memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Berdasarkan penuturan pihak masyarakat adat dahulu Djaka Rumantaka meminta proyek ke Pangeran Djatikusumah terkait renovasi Paseban. Padahal saat itu Pangeran Djatikusumah menurut pihak masyarakat adat bukan lah penentu kebijakan, beliau hanya sebagai ahli agar pembangunan cagar budaya, segala pengerjaan ditanggung oleh pemerintah pusat dan pengelola tender. Namun karena adanya paksaan dari Djaka Rumantaka, akhirnya diberikan lah ia kesempatan untuk mengelola pengadaan kayu jati. Berdasarkan keterangan pihak masyarakat adat renovasi cagar budaya harus sesuai dengan spesifikasi yang jelas, namun singkat cerita Djaka Rumantaka mengirimkan kayu jati muda yang tidak sesuai dengan

---

<sup>91</sup> *Ibid.*,

spesifikasi dan harganya jauh lebih tinggi daripada harga umum di pasaran. Akhirnya hak Djaka Rumantaka sebagai tender pengadaan kayu jati dicabut.

Sedangkan berdasarkan pengakuan Djaka Rumantaka terkait pengadaan proyek renovasi Paseban Tri Panca Tunggal ini adalah bermula pada bulan Maret 2007 Pangeran Djatikusumah pada saat itu mengundang seluruh keturunan Pangeran Madrais berkumpul di Paseban terkait bantuan pemerintah untuk merenovasi Paseban. Djaka Rumantaka mengaku bahwa Djatikusumah akan mengelolanya bersama-sama dengan keluarga. Akhirnya Djaka Rumantaka meminta untuk menjadi tender pengadaan kayu jati karena pikirnya pasti dibutuhkan pengadaan kayu jati yang banyak dan akan menghasilkan keuntungan yang besar baginya.<sup>92</sup> Demi mengerjakan proyek pengadaan kayu jati tersebut Djaka Rumantaka sampai keluar dari pekerjaan lamanya. Namun Djaka Rumantaka memiliki kecurigaan ada permainan dari pihak Paseban, hal tersebut membuat Djaka Rumantaka meninggalkan proyek tersebut.

Dari kedua pengakuan diatas terdapat perbedaan yang cukup signifikan, kedua cerita tersebut saling kontradiktif. Namun dari kedua pengakuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Djaka Rumantaka tidak lagi menjadi penyedia pengadaan kayu jati dalam proyek renovasi Paseban pada tahun 2007. Djaka Rumantaka yang dianggap meresahkan dan selalu mengganggu pembangunan di Paseban kembali dipanggil.<sup>93</sup> Namun, kembali terdapat perbedaan pengakuan dari masyarakat adat dan Djaka Rumantaka. Djaka Rumantaka mengatakan bahwa

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara Djaka Rumantaka pada tanggal 25 November 2017

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat adat AKUR pada tanggal 22 November 2017

dalam pemanggilan tersebut ia diancam dan disuruh menanda tangani surat pernyataan bahwa harus meminta maaf dan akan menjaga nama baik keturunan Pangeran Tedja Buana Alibassa. Sedangkan dari pihak masyarakat adat tidak pernah ada ancaman terhadap Djaka Rumantaka apalagi melakukan tindakan pembunuhan.

Berdasarkan tragedi tersebut akhirnya Djaka Rumantaka memiliki rasa sakit hati dan akhirnya menuntut tanah kepemilikan ibunya ke Pengadilan Negeri Kuningan pada tahun 2009. Hal tersebut dinyatakan oleh Djaka Rumantaka bahwa:

“Saking sakit hatinya saya akhirnya pada tahun 2009 ya tanah yang punya ibu saya Ibu Siti Djenar yang didiami Mimin Saminah, E.Kusnadi, bersama Ira anaknya saya gugat ke Pengadilan.”<sup>94</sup>

Sebelum menuntutnya ke Pengadilan Negeri Kuningan Djaka Rumantaka terlebih dahulu mengurus surat-surat yang dapat membuktikan bahwa tanah tersebut merupakan kepemilikan Ratu Siti Djenar pada tahun 2008.<sup>95</sup>

Pengurusan bukti-bukti administrasi yang dilakukan oleh Djaka Rumantaka merupakan langkah untuk merepresentasi tanah tersebut merupakan asset pribadi kepemilikan ibunya (*representations of space conceived*). Dalam bukunya Lefebvre ruang tidak hanya dipahami sebagai persepsi, melainkan ruang menjadi lebih dapat dipahami dengan pemberian pemahaman terhadap ruang itu sendiri.<sup>96</sup> Pengurusan bukti administrasi yang dilakukan Djaka Rumantaka tidak lain adalah memberi pemahaman terhadap ruang yang dapat menjadi bukti bahwa tanah tersebut merupakan tanah kepemilikan Ratu Siti Djenar Alibassa. Bukti-bukti yang dibawa

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Djaka Rumantaka pada tanggal 25 November 2017

<sup>95</sup> *Ibid.*,

<sup>96</sup> Kosa Lazawardi, *Op.cit.*

oleh Djaka Rumantaka yang tercatat di putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Kuningan yang tercatat adalah sebagai berikut:

- Bukti Letter C No.2321 persil 78 A kelas B.1 luas 224 m<sup>2</sup> atas nama Ratu Siti Djenar Alibassa.
- Dari jumlah keseluruhan yang tercantum dalam Letter C seluas 6210 m<sup>2</sup> atas nama P.Tedja Buana.
- Surat pernyataan Bapak Murkanda S.P pada tanggal 20 November 2008 yang menyatakan bahwa Ibu Ratu Siti Djenar Alibassa sebagai penerima amanat atas tanah dari Pangeran Tedja Buana sebagaimana yang telah disampaikannya pada 17 Mei 1970.
- Surat pernyataan ahli waris tanggal 18 Maret 2009 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Cigugur saudara Utari dan Kepala Kecamatan Cigugur saudara Wiraatmaja, S.AP
- Surat keterangan No.100/132/PEM yang menerangkan bahwa Ratu Siti Djenar memiliki 8 (delapan) anak.
- Akta pembagian Hak Bersama No.70/2009 tertanggal 19 Maret 2009
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan No. 32.10.180.010.042.-0369.0 atas nama Rd Djaka Rumantaka

Atas bukti-bukti tersebut Djaka Rumantaka melaporkan E.Kusnadi dan Kristina Mimin Saminah atas perbuatan melawan hukum karena telah mendirikan bangunan permanen dan menguasai tanah kepemilikan Ratu Siti Djenar Alibassa

ke Pengadilan Negeri Kuningan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata.<sup>97</sup> Dalam hal ini Djaka Rumantaka menggunakan jalur hukum untuk memproduksi dan melegitimasi tanah tersebut.

Ruang abstrak mereduksi hal yang real, dengan cara menciptakan sebuah kekosongan dan mengisi sebuah obyek di dalamnya dengan cara membuat sebuah pemahaman yang berkaitan dengan ruang tersebut.<sup>98</sup> Dengan bukti yang ia miliki Djaka Rumantaka menciptakan kekosongan status kepemilikan hukum obyek sengketa. Di pengadilan Djaka Rumantaka memberikan pemahaman baru atas tanah tersebut dengan cara mengabstraksi bahwa tanah tersebut merupakan tanah kepemilikan Ibunya yang diberikan oleh Pangeran Tedja Buana Alibassa pada tanggal 17 Mei 1970 dengan kesaksian dari Murkanda yang diketahui oleh Lurah Cigugur Utari melalui surat pernyataan.

Tanah tersebut berdasarkan pengakuan Djaka Rumantaka baru didirikan rumah pada tahun 1980 oleh E.Kusnadi dan Kristina Mimin Saminah dengan atas izin Pangeran Djatikusumah.<sup>99</sup> Pernyataan Djaka Rumantaka didukung dengan beberapa saksi yang ia bawa ke persidangan salah satunya adalah Murkanda. Dalam kesaksiannya di Pengadilan Negeri Kuningan pada tahun 2009 Murkanda mengaku bahwa rumah tersebut baru ditinggali pada tahun 1985 oleh keluarga E.Kusnadi. Sedangkan tanah tersebut telah diberikan kepada Ratu Siti Djenar Alibassa semenjak tahun 1970. Maka dari itu menurut Djaka Rumantaka rumah yang telah

---

<sup>97</sup> Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

<sup>98</sup> Henri Lefebvre, *Op.cit*, hlm. 287

<sup>99</sup> Hasil wawancara Djaka Rumantaka pada tanggal 25 November 2017.

didirikan oleh keluarga E.Kusnadi dan Mimin Saminah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena telah mendirikan rumah diatas tanah yang bukan haknya. Djaka Rumantaka melemparkan tuntutan agar tanah darat tersebut untuk dikembalikan seperti awal mulanya dan menyerahkan kepada yang memiliki hak sebenarnya.

Kepemilikan bukti Djaka Rumantaka menurut Pengadilan Negeri Kuningan lebih kuat dibanding yang dimiliki oleh pihak masyarakat adat. Maka dari itu Pengadilan Negeri Kuningan melalui putusannya No.07/Pdt.G/2009/PN.KNG tanggal 18 Januari 2010 memutuskan bahwa yang dilakukan oleh keluarga E.Kusnadi merupakan perbuatan melawan hukum dan yang berhak atas tanah tersebut merupakan keluarga Ratu Siti Djenar Alibassa yang telah diwariskan oleh Pangeran Tedja Buana. Kemenangan Djaka Rumantaka lebih lanjut sampai ke level Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan PK No.21/PK/Pdt/2014 pada tanggal 18 Juni 2014. Sebagaimana yang dikatakan Beckmann bahwa hukum dapat melegitimasi sebuah ruang, ruang yang selama sudah dikonseptualisasikan dan ditinggali oleh masyarakat akan kalah tanpa adanya legitimasi hukum.

Dengan bermodalkan legitimasi hukum yang Djaka Rumantaka miliki, pada tanggal 24 Agustus 2017 dia melakukan eksekusi asset tanah di Blok Mayasih yang ditempati oleh keluarga E.Kusnadi tersebut dengan mengerahkan aparaturnya keamanan yang terdiri dari Brimob, ABRI, Polisi dan Satpol PP. Namun eksekusi tersebut gagal karena perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat adat. Proses



eksekusi masih ditunda sampai waktu yang belum ditentukan, berdasarkan keterangan Djaka Rumantaka, dia akan mengeksekusi lagi tanah tersebut dalam waktu dekat. Djaka Rumantaka mengatakan bahwa jika tanah di Blok Mayasih telah berhasil dieksekusi, tanah tersebut akan diproduksi menjadi rumah makan milik keluarga Ratu Siti Djenar.<sup>100</sup>

### **5.3.1 Analisis Produksi Ruang Blok Mayasih oleh Djaka Rumantaka**

Dari penjabaran diatas tentang produksi ruang blok mayasih oleh Djaka Rumantaka, peneliti akan menganalisa produksi ruang yang dilakukan Djaka Rumantaka berdasarkan teori spasial Lefebvre:

#### ***Spatial Practice Perceived***

Dalam tahapan ini adalah bagaimana ruang dipandang oleh individu. Djaka Rumantaka memandang memandang tanah sengketa di Blok Mayasih ialah sebagai asset pribadi yang dimiliki oleh Ratu Siti Djenar Alibassa yang ditempati atau dikuasai oleh pihak ketiga.

#### ***Representation of Space Conceived***

Tahapan ini merupakan serangkaian proses bagaimana sebuah ruang dikonseptualisasikan. Dalam hal ini Djaka Rumantaka melakukan representasi ruang dengan cara membuat bukti-bukti yang dapat mendukung bahwa tanah tersebut merupakan tanah kepemilikan ibunya. Bukti-bukti administrasi tertulis yang Djaka Rumantaka merupakan serangkaian proses untuk memberi pemahaman

---

<sup>100</sup> *Ibid.,*

terhadap ruang. Selanjutnya untuk melegitimasi bahwa tanah tersebut merupakan tanah kepemilikan Ratu Siti Djenar membawa permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Kuningan dengan tuntutan perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata. Dalam pengadilan Djaka Rumantaka mengabstraksi bahwa tanah tersebut merupakan tanah kepemilikan Ratu Siti Djenar Alibassa yang ditempati oleh E.Kusnadi yang mana seharusnya bukan merupakan haknya untuk menguasai dan menempati tanah tersebut.

Bukti kepemilikan Djaka Rumantaka yang lebih kuat dibandingkan dengan keluarga E.Kusnadi membuat dia menang di pengadilan hingga di level peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan No.21/PK/Pdt/2014 pada tanggal 18 Juni 2014. Dalam hal ini Djaka Rumantaka memproduksi ruangnya dengan melalui hukum. Menurut Franz Von Benda Beckmann hukum memiliki peran vital dalam mengkonstruksi, mengorganisir, dan melegitimasi ruang dan batas-batasnya.<sup>101</sup> Hukum dalam kasus Cigugur ini memiliki peran penting, karena hukum menjadi bahan legitimasi terhadap suatu ruang.

#### **5.4 Politik Ruang Tanah *Ulayat* Blok Mayasih**

Pada awalnya sengketa tanah di Blok Mayasih ini hanya melibatkan seorang masyarakat adat E.Kusnadi dan istrinya Kristina Mimin Saminah dengan Djaka Rumantaka. E.Kusnadi dilaporkan sebagai orang yang melakukan perbuatan melawan hukum karena menempati tanah kepemilikan Ratu Siti Djenar tanpa izin. Dengan bukti-bukti yang telah diuraikan diatas membuat Djaka Rumantaka

---

<sup>101</sup> Franz von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann and Anne Griffiths, *loc.cit*

mengklaim bahwa tanah tersebut dikuasai oleh E.Kusnadi yang seharusnya tidak memiliki hak tersebut.

Kontestasi yang terjadi antara Djaka Rumantaka dan masyarakat adat memiliki perbedaan cara pandang yang saling bertolak belakang. Berikut ini tabel unit analisis berdasarkan hasil temuan di lapangan:

**Tabel 5.1 Perbedaan Cara Pandang Masyarakat Adat dan Djaka Rumantaka**

| <b>Unit Analisis</b> | <b>Masyarakat Adat</b>   | <b>Djaka Rumantaka</b>   |
|----------------------|--|--|
| Tahun dibangun       | 1973   | 1980   |
| Cara pandang         | Tanah yang diamanatkan untuk mengembangkan kegiatan dan pelestarian kebudayaan Cigugur dan diresmikan melalui upacara adat (komunal) | Tanah kepemilikan Ratu Siti Djenar yang dikuasai oleh pihak ketiga (asset/kapital) |
| Status tanah         | Tanah tidak dibagi waris   | Tanah waris  |
| Kerangka Hukum       | Hukum Adat   | Hukum Positivis  |

Sumber : Diolah Peneliti, 2017

Pada dasarnya persengketaan di Blok Mayasih ini merepresentasikan pertentangan ideologis. Djaka Rumantaka merupakan representasi dari masyarakat kapitalisme yang melihat bahwa tanah merupakan asset milik pribadi. Keluarga Kusnadi dan masyarakat adat merupakan representasi dari masyarakat komunalisme. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya kedua belah pihak memiliki cara pandang yang sangat sangat berbeda. Masyarakat adat memandang tanah di Blok Mayasih ini sebagai tanah komunal yang diperuntukan untuk kepentingan bersama masyarakat adat, mereka tidak melihat bahwa tanah adalah asset pribadi yang memiliki nilai profit. Sedangkan Djaka Rumantaka memandang bahwa tanah tersebut merupakan asset pribadi yang dimiliki oleh Ratu Siti Djenar

Alibassa dan tanah ini akan dijadikan rumah makan yang dapat memberikan nilai profit. Cara pandang Djaka Rumantaka ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Lefebvre bahwa status kepemilikan merupakan salah satu cara kapitalisme dalam mengontrol sebuah ruang.<sup>102</sup> Sengketa perebutan tanah ini merupakan kontestasi kelas-kelas yang ingin menguasai tanah tersebut.

Pada kasus persengketaan tanah ini Djaka Rumantaka ini lebih diunggulkan karena kepemilikan bukti administratif yang telah ia persiapkan. Dengan bukti yang dimiliki oleh Djaka Rumantaka mengabstraksi bahwa tanah tersebut merupakan tanah kepemilikan Ratu Siti Djenar Alibassa yang diwariskan oleh Pangeran Tedja Buana pada tanggal 17 Mei 1970 dan keluarga Kusnadi menguasai tanah tersebut tanpa seizin dari pihak yang memiliki hak dengan membangunnya menjadi rumah permanen pada tahun 1980. Sedangkan menurut masyarakat adat dalam pengakuannya yang peneliti temukan di lapangan tanah tersebut diamanahkan oleh Pangeran Tedja Buana kepada E.Kusnadi pada tahun 1973 untuk membantu mengembangkan kesenian di Cigugur. Berikut ini adalah pengakuan Pak Subrata salah satu masyarakat adat Cigugur:

“Dulunya kosong, hanya waktu masih ada Bapak Pangeran Tedja Buana, Pak Kusnadi itu orang tuanya Pak Kusnadi dipanggil sama Bapak Pangeran Tedja Buana, katanya tapi memang itu jelas, semua pada taunya, karena Pak Kusnadi itu keluaran ITB ahli seni rupa, oleh Bapak Tedja Buana supaya membantu Bapak Pangeran Djatikusumah kan gitu. Maka oleh Bapak Pangeran Tedja Buana disuruh bikin rumah disana, itu kan sabda pangeran.”

Menurut Pak Subrata tanah tersebut merupakan Sabda Pangeran karena memang rumah tersebut dahulu ditujukan untuk membantu mengembangkan

---

<sup>102</sup> Andrzej Zielniec, *op.cit*, hlm.67

kesenian dan merupakan sebuah sabda Pangeran. Dalam persidangan pula tergugat E.Kusnadi dan Mimin Saminah telah menghadirkan pekerja yang turut membangun rumah tersebut dan menyatakan bahwa rumah tersebut telah dibangun pada tahun 1973 yaitu Sakim dan Ebo Seba. Namun, dalam putusannya hakim Pengadilan Kuningan pada tingkat pertama menetapkan bahwa tanah tersebut baru dibangun pada tahun 1980.

Landasan kuat pengadilan memutuskan perkara ini adalah surat keterangan dari Murkanda yang diketahui oleh Utari selaku Lurah Cigugur yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang diwariskan oleh Pangeran Tedja Buana dan Letter C No.2321 Persil 78a kelas b.1 luas 224 m<sup>2</sup> dari keseluruhan Letter C seluas 6210 m<sup>2</sup> atas nama Pangeran Tedja Buana. Hal tersebut tidak dibenarkan oleh Pangeran Djatikusumah selaku keturunan Pangeran Tedja Buana dalam persidangan, menurutnya tanah Pangeran Tedja Buana tidak dibagi wariskan selanjutnya keluarga E.Kusnadi menggelar upacara adat Sunda saat pembangunan rumah tersebut yang diketahui oleh Pangeran Tedja Buana.<sup>103</sup> Namun, keterangan Pangeran Djatikusumah ini tidak sumpah oleh Pengadilan Negeri Kuningan karena masalah agama yang dia anut sebagai masyarakat adat yaitu Sunda Wiwitan dan Djaka Rumantaka memiliki bukti tertulis yang dapat mendukung argumentasinya dalam mengabstraksi ruang dalam pengadilan. Maka dari itu Pengadilan Negeri Kuningan memutuskan bahwa pemegang hak atas tanah tersebut adalah keluarga Ratu Siti Djenar Alibassa.

---

<sup>103</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kuningan No.07/Pdt.G/2009/PN.KNG

Djaka Rumantaka telah memenangkan kasus ini hingga tingkat Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan PK No.21/PK/Pdt/2014 pada tanggal 18 Juni 2014. Namun mengingat persoalan ini bukan lah permasalahan pribadi dari keluarga E.Kusnadi melainkan permasalahan komunal masyarakat adat dan rumah tersebut juga merupakan rumah pendukung yang tidak dapat terpisahkan dari Paseban Tri Panca Tunggal (*lived space*) membuat masyarakat adat mengajukan perlawanan pihak ketiga/ *Derden Verzvet* atas putusan Peninjauan Kembali no.21PK/Pdt/2014.<sup>104</sup>

Selain alasan tersebut diketahui pula bahwa ada indikasi pemalsuan dokumen, keterangan palsu, maladministrasi dalam pencatatan pertanahan, yang kurang didalami dengan cermat oleh Majelis Hakim. Adanya indikasi tersebut telah ditindaklanjuti berupa Laporan Polisi No.LP/B/231/V/2013 Polres yang telah menetapkan satu tersangka yaitu mantan Lurah Utari.<sup>105</sup> Menjadi tersangkanya Utari dalam konflik ini menjadi pertanda bahwa ada keterlibatan elite lokal yang terlibat dalam persengketaan tanah ini. Hal tersebut turut dipertegas dengan pernyataan dari Lurah Cigugur saat ini yang mengatakan bahwa kasus ini sangat rawan karena Lurah yang sebelumnya dipindahkan karena kasus ini.<sup>106</sup>

Dalam sidang perlawanan pihak ketiga ini merupakan area kontestasi antara hukum positivis dan hukum adat dalam memproduksi dan melegitimasi ruang. Pasal 20 UUPA nomor 5 tahun 1960 menegaskan bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hasil

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Okky Satrio pada tanggal 24 November 2017.

<sup>105</sup> Nota Komisi 1 DPRD Kabupaten Kuningan nomor 03/Komisi I – DPRD/ 2017 pada tanggal 18 Agustus 2017

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Lurah Cigugur pada tanggal 24 November 2017

Keputusan Pengadilan Negeri Kuningan No.07/Pdt.G/2009/PN.KNG hingga Putusan Mahkamah Agung RI PK No.21/PK/Pdt/2014 telah menegaskan bahwa Ratu Siti Djenar Alibassa merupakan pemilik sah atas tanah di Blok Mayasih tersebut atas warisan dari Pangeran Tedja Buana. Sedangkan bagi masyarakat adat sesuai manuskrip yang telah diturunkan oleh sepuh adat tanah tidak dapat dibagiwariskan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 20 UUPA 1960 tersebut, tanah bagi mereka adalah kepemilikan komunal masyarakat adat.

Sampai saat ini proses hukum perlawanan pihak ketiga masih berjalan. Namun, berdasarkan keterangan kuasa hukum masyarakat AKUR Cigugur dalam perkara ini Majelis Hakim masih melihat kasus ini dalam kerangka hak waris bukan hak tanah adat, hal itu disebabkan karena salah satunya belum terlegitimasinya masyarakat AKUR Cigugur melalui Peraturan Daerah.<sup>107</sup> Hal tersebut diatur dalam Pasal 67 ayat 2 UU No. 41 Tahun Tentang Kehutanan, pengakuan masyarakat adat ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

Legitimasi hukum yang telah dimiliki oleh Djaka Rumantaka atas kepemilikan tanah tersebut membuat Djaka Rumantaka melakukan eksekusi pada tanggal 24 Agustus 2017. Namun eksekusi yang dilakukan oleh Djaka Rumantaka dapat digagalkan oleh masyarakat adat karena mereka menjaga amanat leluhur yang telah dituliskan dalam manuskrip dan menganggap bahwa tanah atau rumah tersebut merupakan tanah adat yang harus dipertahankan.

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa ruang merupakan sebuah produk politik yang diperebutkan. Sebagaimana yang telah diutarakan Lefebvre

---

<sup>107</sup>Hasil wawancara dengan kuasa hukum AKUR pada tanggal 30 November 2017.

bahwa ruang adalah produk politik, sehingga dalam penciptaan ruang tidak lah netral dan pasif. Masyarakat adat AKUR memproduksi ruang secara sosio spasial, sedangkan Djaka Rumantaka memproduksinya melalui pembuatan bukti administrasi formal dan proses hukum. Penelitian ini menemukan bahwa hukum memiliki peran penting dalam mengkonstruksi dan melegitimasi sebuah ruang sebagaimana yang telah disampaikan oleh Franz Von Benda Beckmann, *et.al*.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap produksi ruang adat *ulayat* dalam sengketa perebutan tanah *ulayat* di Blok Mayasih Cigugur ini peneliti menyimpulkan, bahwa:

1. Masyarakat adat memproduksi ruang secara sosio spasial. Tanah yang diamanatkan oleh Pangeran Tedja Buana untuk mengembangkan kesenian dan kebudayaan dikonseptualisasikan dengan pelbagai simbol dan ornamen yang memiliki keterikatan dengan kebudayaan Cigugur. Sehingga rumah ini tidak hanya menjadi rumah tinggal, melainkan menjadi rumah dinas yang mendukung kegiatan Paseban. Pemahaman kosmologi ruang dan pesan manuskrip membuat masyarakat adat mempertahankan tanahnya.
2. Djaka Rumantaka memproduksi ruang dengan cara menggunakan bukti kepemilikan formal dan jalur hukum. Bukti kepemilikan formal yang Djaka Rumantaka miliki lebih kuat sehingga Pengadilan melegitimasi bahwa tanah tersebut sebagai tanah waris yang dimiliki oleh Ratu Siti Djenar Alibassa.
3. Penelitian ini menemukan bahwa hukum memiliki peran penting dalam mengkonstruksi dan melegitimasi sebuah ruang.

## 6.2 Rekomendasi

1. Dengan adanya persoalan diatas peneliti mengharapkan lebih banyak akademisi, peneliti, dan masyarakat yang mengkaji tentang ruang adat khususnya dalam bidang ilmu politik demi pengembangan keilmuan.
2. Pengadilan Negeri Kuningan seharusnya dapat melihat kasus ini dalam sudut pandang pluralisme hukum dan lebih memperhatikan riwayat tanah, dibanding hanya dengan melihat bukti kepemilikan administratif.
3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan penelitian lebih melihat dan menganalisis tentang konflik yang terjadi dalam kasus sengketa perebutan tanah *ulayat* di Blok Mayasih Cigugur.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Beckmann, Franz von Benda, Keebet von Benda-Beckmann and Anne Griffiths. 2009. *Spatializing Law*. England: Ashgate Publishing Limited
- Goonewardana, Kanishka, dkk. 2008. *Space, Difference , Everyday Life*. New York : Routledge.
- Hidayat, Dedy Nur. 2003. *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*. Jakarta :FISIP Universitas Indonesia.
- Karli, H dan Yuliariatiningsih,M.S. 2003 . *Model-Model Pembelajaran*. Bandung : Bina Media Informasi.
- Kukla, Andre. 2000. *Social Constructivism and the Philosophy of Science*. London : Routledge.
- Lefebvre, Henri. 1991. *The Production of Space*. United Kingdom: Basil Blackwell.
- Marsh, David dan Stoker, Gerry. 2011. *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. California : Sage Publications
- Rosidi, Achmad. 2011. *Perkembangan Paham Keagamaan Lokal di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Prenadamedia.
- Zaman, Nurus. 2016. *Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum dan Hak Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Refika Aditama.
- Zielnic, Andrzej. 2007. *Space and Social Theory*. London: Sage Publications.
- Jurnal :
- Aminah, Siti. 2015. *Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota di Surabaya*. Jakarta: Lab Sosio Universitas Indonesia.

- Arimbawa, Wahyudi dan I Komang Gede Santhyasa. 2010. *Perspektif Ruang Sebagai Entitas Budaya Lokal (Orientasi Simbolik Ruang Masyarakat Tradisional Desa Adat Panglipuran, Bangli – Bali)*. Jakarta: Local Wisdom Jurnal Ilmiah Volume II Desember tahun 2010.
- Ernawi, Imam Santoso. 2009. *Kearifan Lokal Dalam Perencanaan dan Perancangan Kota Untuk Mewujudkan Kota yang Berkelanjutan*. Malang : Group Konservasi dan Arsitektur Kota
- Gumilang, R. Emmy Ratna, R. Dewi Kanti Setianingsih, Ira Indrawardana, Euis Kurniasih. 2016. *Gambaran Umum Naskah Koleksi Paseban Tri Panca Tunggal, Cigugur – Kuningan*. Jakarta : Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jurnal Manassa Manuskripta Vol.6, No.2, 2016.
- Holilah, Mina. 2015. *Kearifan Ekologis Budaya Lokal Masyarakat Adat Cigugur Sebagai Sumber Belajar IPS*. Bandung : Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 24, No. 2, Edisi Desember 2015.
- Martanto, Ucu. 2012. *Ruang dan Konflik Wilayah: Cerita dari Enam Desa*. Yogyakarta : CSPA Universitas Gadjah Mada.
- Musnita, Irin Siam 2008. *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi di Kabupaten Sorong*. Semarang : Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponogoro.
- Nuhrison, M. Nuh. 2011. *Paham Madrais/ Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur Kuningan : Studi Tentang Ajaran dan Pelayanan Hak-hak Sipil*. Jakarta : Jurnal Harmoni Volume X, Nomor 3, Juli – September 2011, Puslitbang Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Permadi, Tedi. 2016. *Identifikasi Tiga Naskah Wasiat Madrais S. Allibasa Koleksi Paseban Tri Panca Tunggal, Cigugur, Kuningan*. Jakarta: Kerja Sama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan Universitas Leipzig, Jurnal Manassa Manuskripta Vol.6, No.2 2016.
- Sugiswati, Besse. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat di Indonesia*. Jurnal Perspektif Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari.
- Syaripulloh. 2014. *Kebersamaan dalam Perbedaan : Studi Kasus Masyarakat Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat*. Jakara: Jurnal Sosio Didaktika: Vol. 1, No. 1 Mei 2014.
- Turner, Victor. 1974. *Liminal to Liminaloid, In Play, Flow and Ritual*. Texas: Rice U

Qodriyatun, Sri Nurhayati. 2015. *Pengabaian Negara Atas Masyarakat Adat*. Jakarta : Info Singkat Kesejahteraan Sosial DPR RI Vol. VII, No. 06/II/P3DI/Maret 2015.

Karya Ilmiah :

A, Yunita Dwi. 2014. *Kajian Ruang Liminal Pada Konsep Teritori Permukiman Adat Sunda Cigugur Melalui Analisis Ritual Ngajayak*. Prosiding Temu Ilmiah IPLBI.

Frank, Simon Abdi Kari. 2009. *Membayangkan Adat : Suatu Kajian Tentang Tanah Adat, Sengketa dan Penyelesaian di Kotamadya dan Kabupaten Jayapura, Provinsi Jayapura*. Depok: Disertasi Universitas Indonesia

Lazawardi, Kosa. 2012. *Rang yang Tercipta oleh Para Pesepeda (Studi Kasus: Bundaran Hotel Indonesia pada Acara Car Free Day)*. Depok: Universitas Indonesia.

Siahaan, Jojor Yuni Artha. 2017. *Analisis Sosio-Yuridis Atas Hak Kebebasan Beragama Dan Berkepercayaan Masyarakat Sunda Wiwitan (Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Hal Pemenuhan Hak-Hak Sipil)*. Jakarta: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Syam, Syahriana dan Syahrianti. 2015. *Proses Perubahan Ruang Akibat Konflik (Studi Kasus : Kawasan Kampung Bajo Sulawesi Selatan)*. Prosiding Temu Ilmiah IPLBI.

Produk Hukum :

Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 tahun 1999.

Pasal 1365 KUH Perdata.

Putusan Mahkamah Agung RI PK No.21/PK/Pdt/2014.

Putusan Pengadilan Negeri Kuningan No.07/Pdt.G/2009/PN.KNG.

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 371Pdt/2016/PT.BDG.

Surat Keputusan Direktorat Sejarah dan Purbakala Direktorat Jendral Kebudayaan No. 3632/C.1/DSP/1976.

UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UUD 1945 pasal 18B ayat 2.

UUPA Nomor 5 Tahun 1960.

Sumber *Daring* :

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). 2016. Diakses dari [www.aman.or.id/.../PROFIL-AMAN\\_Update\\_Bahasa\\_Oct2016.pdf](http://www.aman.or.id/.../PROFIL-AMAN_Update_Bahasa_Oct2016.pdf) pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 12.28 WIB.

Darmayana, Hiski. 2017. *Tuntut Pembatalan Eksekusi Lahan Masyarakat Adat Cigugur Tak Henti Berjuang*. Diakses dari <http://jabarkahiji.id/2017/05/20/tuntut-pembatalan-eksekusi-lahan-masyarakat-adat-cigugur-tak-henti-berjuang/> pada tanggal 25 Mei 2017 pukul 17.27 WIB.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. 2011. *Tari Buyung*. Diakses dari <http://www.disparbud.jabarprov.go.id/wisata/dest-det.php?id=387&lang=id> pada tanggal 19 Desember 2017 pukul 00.24 WIB

Irfan, Muhammad. 2017. *Tanah Adat Cigugur Terancam Dieksekusi*. Diakses dari <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/05/18/tanah-adat-cigugur-terancam-dieksekusi-401436> pada tanggal 25 Mei 2017 pukul 16.59 WIB.

Sumber Lainnya :

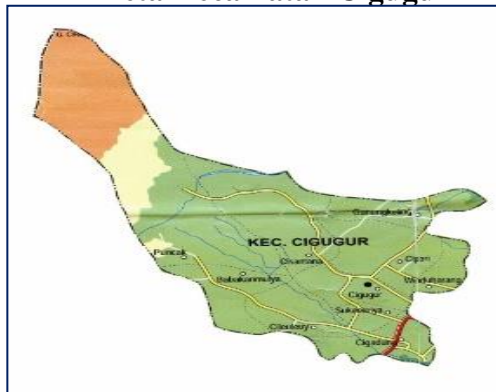
Nota Komisi 1 DPRD Kabupaten Kuningan nomor 03/Komisi I – DPRD/ 2017 pada tanggal 18 Agustus 2017

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Latar Geografis dan Sosial Masyarakat Cigugur

Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) merupakan sekelompok masyarakat adat yang bermukim di Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Masyarakat AKUR tidak selayaknya masyarakat adat seperti Baduy yang memiliki satu wilayah sendiri dalam suatu kampung, melainkan masyarakat adat ini ikut hidup bersama penduduk lainnya di Kecamatan Cigugur. Letak kecamatan ini tidak jauh dari ibukota Kabupaten Kuningan hanya sekitar 3,5 km dari pusat pemerintahan Kuningan.

**Peta Kecamatan Cigugur**



Sumber : <http://www.kuningankab.go.id/pemerintahan/kecamatan/kecamatan-cigugur>, 2017.

Luas wilayah Kecamatan Cigugur sendiri adalah  $\pm 3.369,576$  Ha dengan dipimpin oleh seorang Camat bernama Suryono, S.Sn., M.M.Pd,. Kecamatan Kuningan terdiri dari 10 wilayah administratif kelurahan atau desa yaitu :

### Wilayah Administratif Kecamatan Cigugur

| No | Kelurahan    | Wilayah |     |    | Kepala Desa                |
|----|--------------|---------|-----|----|----------------------------|
|    |              | Dusun   | RT  | RW |                            |
| 1  | Cigugur      | 5       | 38  | 13 | Nono Darsono               |
| 2  | Cipari       | 7       | 20  | 7  | Rosidin                    |
| 3  | Sukamulya    | 3       | 10  | 6  | R.Iwan A Wiranggapathi     |
| 4  | Cigadung     | 7       | 32  | 7  | Sandi, S.STP               |
| 5  | Cisantana    | 5       | 52  | 16 | Murad, S.Ag                |
| 6  | Winduherang  | 4       | 16  | 5  | Sukijan, S.Ap, M.Si        |
| 7  | Gunungkeling | 5       | 12  | 5  | Sukat, S.Kom               |
| 8  | Cileuleuy    | 5       | 20  | 5  | Kadarisman                 |
| 9  | Babakanmulya | 5       | 18  | 6  | Pjs. Utari                 |
| 10 | Puncak       | 5       | 24  | 9  | Diding Maslihudin,<br>A.Ma |
|    | Jumlah       | 50      | 243 | 79 |                            |

Sumber: Diolah Peneliti, 2017.

Dari 10 kelurahan yang berada di Kecamatan Cigugur, masyarakat adat AKUR bermukim di salah satu kelurahan yaitu Kelurahan Cigugur. Kelurahan Cigugur memiliki luas wilayah 300,15 Ha dan terletak di sisi timur kaki Gunung Ciremai. Kelurahan Cigugur terdiri dari 4 Dusun yaitu: Dusun Wage, Puhun, Pahing, dan Manis.

Jumlah penduduk di Kelurahan Cigugur berdasarkan data dari Survei Mawas Diri (SMD) tahun 2017 yang diperoleh dari Kelurahan Kuningan adalah berjumlah 7.261 orang. Dengan komposisi 3.741 laki-laki dan 3.520 perempuan.



## Lampiran Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi Peneliti dengan Pangeran Djatikusumah



Dokumentasi Peneliti dengan Pak Ira Indrawardana



Dokumentasi Peneliti dengan Ibu Ratu Dewi Kanti dan Kang Okky Satrio



Dokumentasi Peneliti dengan Bapak Djaka Rumantaka



Dokumentasi Peneliti dengan Ibu Kristina Mimin Saminah



Dokumentasi Peneliti dengan Ibu Ratu Emy





Dokumentasi Penelitian dengan Masyarakat AKUR Cigugur



Dokumentasi Peneliti dalam Rangkaian Acara Adat Peringatan 185 Tahun  
Pangeran Sadewa Madrais Alibassa Kusuma Wijaya Ningrat





Dokumentasi Peneliti dengan Pak Antonius Cahyadi (Kuasa Hukum AKUR Cigugur)



Dokumentasi Peneliti dengan Ibu Lidwina Inge (Dosen FH UI)



Dokumentasi Peneliti dengan Prof. Sulistyowati Irianto (Guru Besar FH UI dan saksi ahli)